

# BHUMI PURA

CITA CITRA GERBANG NEGARA



Kementerian Imigrasi  
dan Pemasyarakatan  
Direktorat Jenderal Imigrasi

## Edisi 05

Volume 12/Oktober 2025  
[www.imigrasi.go.id/majalah](http://www.imigrasi.go.id/majalah)  
Majalah Media Keimigrasian



## SINERGI INOVASI DI GARIS TERDEPAN

Transformasi layanan keimigrasian melalui platform All Indonesia dari Direktorat Jenderal Imigrasi menjadi langkah kolaborasi dalam mewujudkan layanan lintas batas yang efisien, aman, dan berstandar global.

ISSN 3025-5333



9 773025 533006



# Paspor Kelar, Weekend Lancar!

Temukan layanan percepatan paspor Sabtu-Minggu di sini.

## Lokasi & Waktu Layanan

**Immigration Lounge  
Senayan City**  
Pukul 08.00-14.00

**Immigration Lounge  
Mall Taman Anggrek**  
Pukul 10.00-14.00

**Immigration Lounge  
Pondok Indah Mall 3**  
Pukul 08.00-14.00

**Immigration Lounge  
Grand Metropolitan  
Bekasi**  
Pukul 10.00-14.00

**Immigration Lounge  
Pesona Square Depok**  
Pukul 10.00-15.00

**Immigration Lounge  
Icon Mall Gresik**  
Pukul 10.00-17.00

**Immigration Lounge  
Ciputra World Surabaya**  
Pukul 10.00-14.00

**UP3 Pasar Pagi  
Mangga Dua**  
Pukul 10.00-14.00

**UP3 Lippo Mall Kemang**  
Pukul 09.00-11.00

### Siapkan Dokumen Persyaratan

**Pemohon dewasa:**

- KTP, kartu keluarga, akta kelahiran/ijazah/buku nikah
- Paspor lama (bagi yang telah memiliki paspor)

**Pemohon anak di bawah umur:**

- KTP orang tua, kartu keluarga, akta kelahiran/surat baptis
- Bukti menikah orang tua yang sah
- Paspor orang tua (pendamping)
- Paspor lama (bagi yang telah memiliki paspor)

Dapatkan informasi lebih lanjut melalui Instagram:

@kanimjakpus\_, @imigrasi\_jakbar, @kanimjaksel, @imigrasi\_jakut,  
@imigrasi.soekarnohatta, @imigrasibekasi, @imigrasi\_depok, @imi\_surabaya





## GERAK INOVASI IMIGRASI

Salam hangat dari redaksi! Edisi kali ini hadir sebagai cerminan peran Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi dalam menjaga pintu gerbang negara dengan kesiapan teknologi. Kami menyajikan rangkuman peristiwa, kebijakan, dan kisah-kisah inspiratif yang terangkum apik dari barat Indonesia hingga Merauke.

Fokus utama edisi ini ada pada tema "All Indonesia: Sinergi Kunci Gerbang Negara" dalam rubrik *Laporan Utama*. Inovasi ini adalah wujud nyata bagaimana teknologi dan kolaborasi menjadi benteng pertama pengamanan pintu masuk negara kita. Tak kalah menarik, *Liputan Khusus* akan membawa Anda ke perbatasan, mengungkap kisah humanis "Satu Suku, Dua Negara: Kisah dari Ujung Timur Indonesia" dan potret pendidikan imigrasi di "Dari Pos Imigrasi hingga Ruang Kelas: Cerita dari Bupul".

Di ranah regulasi, kami mengulas dampak pemberlakuan KUHP baru pada tatanan keimigrasian dalam rubrik *Kebijakan*. Sementara itu, *Kerja Kita* menampilkan ketegasan petugas di lapangan, mulai dari penindakan warga negara asing (WNA) yang menyalahgunakan *visa on arrival* (VoA), kasus penggalangan dana ilegal, hingga kabar baik tentang capaian investasi melalui program *golden visa* yang telah menerbitkan 1.012 izin. "Kompilasi Gakkum" dalam *Kerja Kita* juga kami sajikan sebagai bukti penegakan hukum yang tak kenal kompromi.

Jangan lewatkan ulasan ringan tetapi mendalam pada rubrik *InformaTips* yang membahas paspor bagi anak berkewarganegaraan ganda, serta sudut pandang menarik di *Opini* mengenai "Dilema Kebijakan Publik: Antara Kebijakan Populis dan Kebijakan Berbasis Data". Edisi ini ditutup dengan kabar gembira dari *Kilas Peristiwa* yang meliput diraihnya lima penghargaan pada Anugerah Humas Indonesia 2025.

Selamat membaca, Sahabat Mido! Semoga setiap halaman edisi ini memperkaya wawasan dan menumbuhkan kebanggaan kita sebagai bagian dari keluarga besar insan Imigrasi.



### cerita sampul

Kecepatan teknologi *autogate* yang mengutamakan keringkasannya kini diimbangi dengan kesiapsiagaan petugas yang menjamin keamanan. Sinergi ini terwujud berkat integrasi data digital secara nasional dalam sistem All Indonesia.

#### PENGARAH

Plt. Direktur Jenderal Imigrasi

#### PENANGGUNG JAWAB

Sekretaris Direktorat Jenderal Imigrasi

#### PEMIMPIN UMUM

Koordinator Fungsi Komunikasi Publik

#### PEMIMPIN REDAKSI

Yolanda Rosylvia Juniar

#### ANGGOTA REDAKSI

Ajeng Dhyanti Paramitha, Ajeng Rahma Safitri, Arif Rahman Suryaman, Dimas Zainuddin Sukmajatnika, Eka Safitri, Elyan Nadian Zahara, Fipit Fatimah, Habil Ashari, Irnadika Natasia Tiominar, Mayza Fairda, Riski Amalia, Rr. Aditya Citraningtyas Ningrum, Yanos Okterano

#### PENYUNTING BAHASA

Tim Narabahasa

#### ILUSTRATOR SAMPLU

Gepszki

#### PENATA LETAK & DESAIN

Tim Narabahasa

#### PERCETAKAN

Tim Narabahasa

#### SIRKULASI

Komunikasi Publik Direktorat Jenderal Imigrasi

#### ALAMAT REDAKSI

Gedung Direktorat Jenderal Imigrasi, Lt. 8, Jl. H.R. Rasuna Said, Kav. X-6, No. 8, Kuningan, Jakarta Selatan

#### KONTAK REDAKSI

majalah.bhumipura@imigrasi.go.id

Redaksi menerima kontribusi tulisan dan artikel yang sesuai dengan misi penerbitan. Redaksi berhak mengubah isi tulisan tanpa mengubah maksud dan substansi. Tulisan/ artikel yang dimuat akan mendapatkan honor sesuai standar yang berlaku.

**DARI REDAKSI**

3. Gerak Inovasi Imigrasi

**LAPORAN UTAMA**

8. All Indonesia: Sinergi Kunci Gerbang Negara

**LIPUTAN KHUSUS**

12. Satu Suku, Dua Negara: Kisah dari Ujung Timur Indonesia

14. Dari Pos Imigrasi hingga Ruang Kelas: Cerita dari Bupul

**KEBIJAKAN**

16. Menyambut Era Baru Hukum Pidana Indonesia

18. Passenger Analysis Unit: Teknologi Keamanan Perbatasan Berbasis Mahadata dan AI

**KERJA KITA**

20. Imigrasi Catat 1.012 *Golden Visa* Diterbitkan, Sumbang Investasi Rp48 Triliun

21. Menginap dan Tidak Mau Bayar, 4 WN Bangladesh Diganjar Deportasi

22. Menyalahgunakan VoA untuk Ikut Pelatihan Kerja, 4 WN Inggris Dideportasi

23. Galang Dana Ilegal, WN Polandia Dideportasi Kantor Imigrasi Bima

24. Menjaga Wibawa Pulau Dewata: Satgas Patroli Imigrasi Tingkatkan Sentimen Positif

25. Langgar Izin Tinggal, 43 WNA Pekerja Kelab Malam Diamankan Imigrasi

26. Kompilasi Gakkum

**KILAS PERISTIWA**

28. Kolaborasi Strategis Perkuat Layanan Imigrasi dan Kepatuhan Dunia Usaha

30. Ditjen Imigrasi Raih 5 Penghargaan di Ajang AHI 2025

31. Jawab Tantangan Mobilitas Global, 15 Petugas Imigrasi Indonesia Ikuti Pelatihan di Korea Selatan

32. Ngopi Pimpasa: Edukasi tentang TPPO dan Pekerja Legal oleh Imigrasi Soekarno-Hatta

# 40. Pojokomunikasi

Dari Hati Sampai ke Hati:  
Komunikasi Publik yang Berempati

**URUS PASPOR CEPAT, SATSET,  
DAN BISA SAMBIL NGE-MALL DI**

# **Immigration Lounge**

Tersedia di **8 Mal Besar** di Indonesia

Melayani **permohonan percepatan paspor elektronik**  
(permohonan baru dan penggantian paspor)

## **Daerah Khusus Jakarta**

- **Pondok Indah Mall 3, Lantai B2**  
Senin–Jumat pukul 10.00–18.00 WIB  
Sabtu–Minggu pukul 10.00–14.00 WIB
- **Mall Taman Angrek, Lantai LG**  
Senin–Jumat pukul 10.00–18.00 WIB  
Sabtu–Minggu pukul 10.00–14.00 WIB
- **Senayan City, Lantai 6**  
Senin–Jumat pukul 08.00–16.00 WIB  
Sabtu–Minggu pukul 08.00–14.00 WIB
- **Kebayoran Park Mall, Lantai LG**  
Senin–Jumat pukul 08.00–16.00 WIB  
Sabtu–Minggu pukul 08.00–14.00 WIB

## **Jawa Barat**

- **Grand Metropolitan Mall, Bekasi**  
Senin–Jumat pukul 10.00–18.00 WIB  
Sabtu–Minggu pukul 10.00–14.00 WIB
- **Pesona Square Mall Depok, Lantai 3**  
Senin–Jumat pukul 10.00–18.00 WIB

## **Jawa Timur**

- **Icon Mall Gresik, Kabupaten Gresik**  
Senin–Jumat pukul 10.00–18.00 WIB
- **Ciputra World Mall Surabaya, Lantai 4**  
Senin–Kamis pukul 10.00–18.00 WIB  
Jumat pukul 10.00–18.30 WIB

## **Biaya**

- Paspor elektronik masa berlaku 5 tahun  
**Rp650.000**
- Paspor elektronik masa berlaku 10 tahun  
**Rp950.000**
- Percepatan paspor **Rp1.000.000**

Ajukan permohonan  
dan daftar melalui

**Aplikasi M-Paspor**

Unduh sekarang di





- 33. Lomba Esai Nasional Imigrasi Jambi dan UNAJA: Generasi Muda Salurkan Gagasan Kritis dan Konstruktif
- 34. Seleksi Transparan, Ketat, dan Kompetitif: Silmy Karim Umumkan 3 Nama Calon Dirjen Imigrasi

**INFORMATIPS**

- 36. Salah Input Data di Platform All Indonesia? Ini Solusinya
- 37. Ketahui Aturan Khusus tentang Paspor bagi Anak Berkewarganegaraan Ganda

**OPINI**

- 38. Dilema Kebijakan Publik: Antara Kebijakan Populis dan Kebijakan Berbasis Data

**POJOKOMUNIKASI**

- 40. Dari Hati Sampai ke Hati: Komunikasi Publik yang Berempati

**RENJANA**

- 42. Masa Depan Kreasi Digital: Apa yang akan Anda Ciptakan di Roblox?

**INFOGRAFIK**

- 44. Panduan Penggunaan All Indonesia di *allindonesia.imigrasi.go.id*
- 45. Capaian 1 Tahun Direktorat Jenderal Imigrasi

**KABAR DARI SEBERANG**

- 46. IJFF 2025: Ribuan Diaspora Indonesia Ramaikan Festival Persahabatan Indonesia-Jepang
- 47. KDEI Taipei Kawal Penggantian Paspor Darurat PMI Korban Kecelakaan Kerja

**RESENSI**

- 48. *Think Like A Monk*: Menjawab Kegelisahan Manusia Modern

**49. MATA LENSEA  
50. KOMIK**



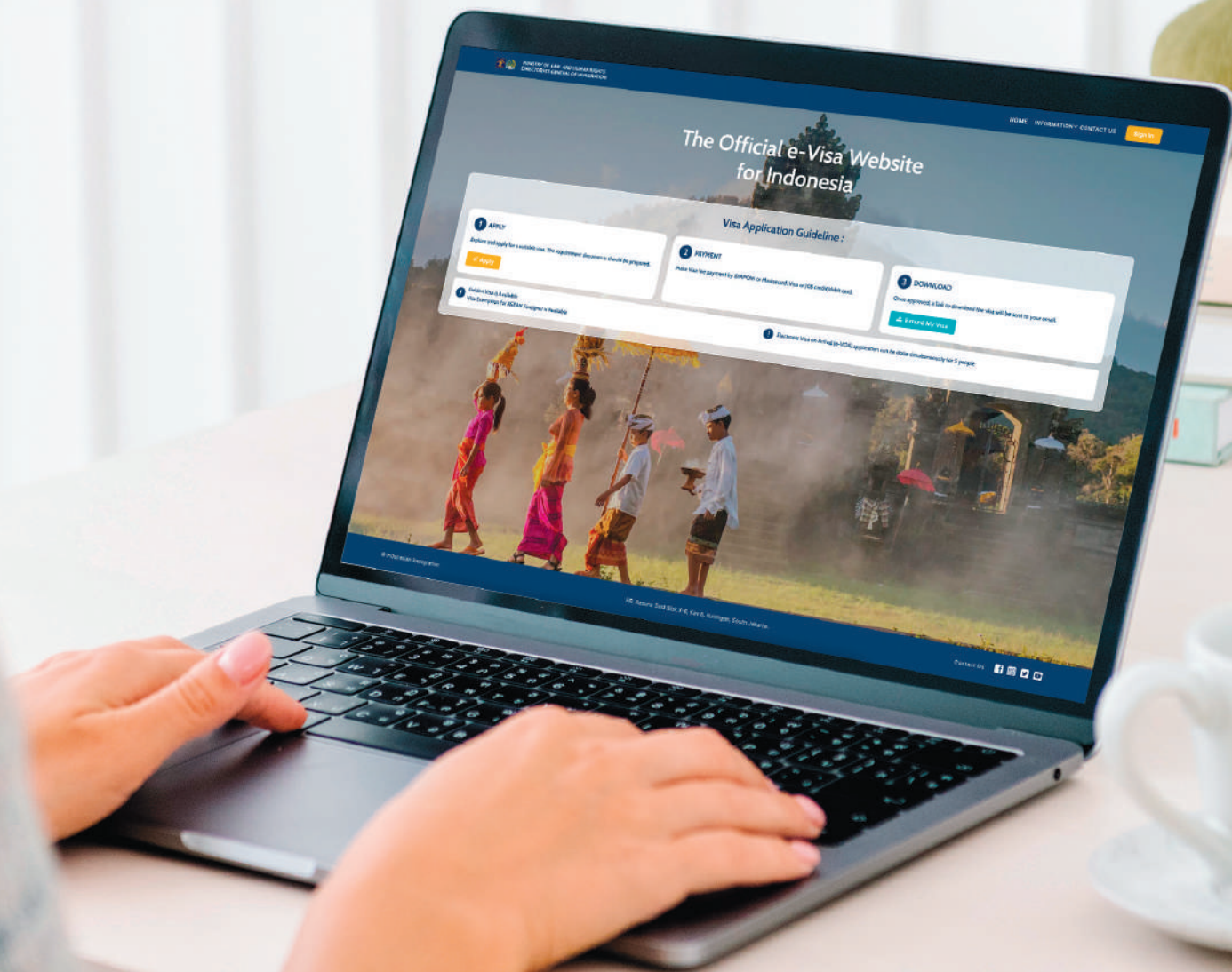
BhumiPura adalah media internal yang diterbitkan secara resmi oleh Direktorat Jenderal Imigrasi. Majalah ini menyajikan berita dan tulisan seputar keimigrasian secara aktual, mendalam, dan informatif.

BhumiPura saat ini dapat dibaca atau diunduh melalui [imigrasi.go.id/majalah](http://imigrasi.go.id/majalah).

Now, you can apply for  
**electronic visa on arrival (e-VOA),  
visitor visa for tourism, and e-VOA extension**

through **evisa.imigrasi.go.id**

Access now and experience the convenience!



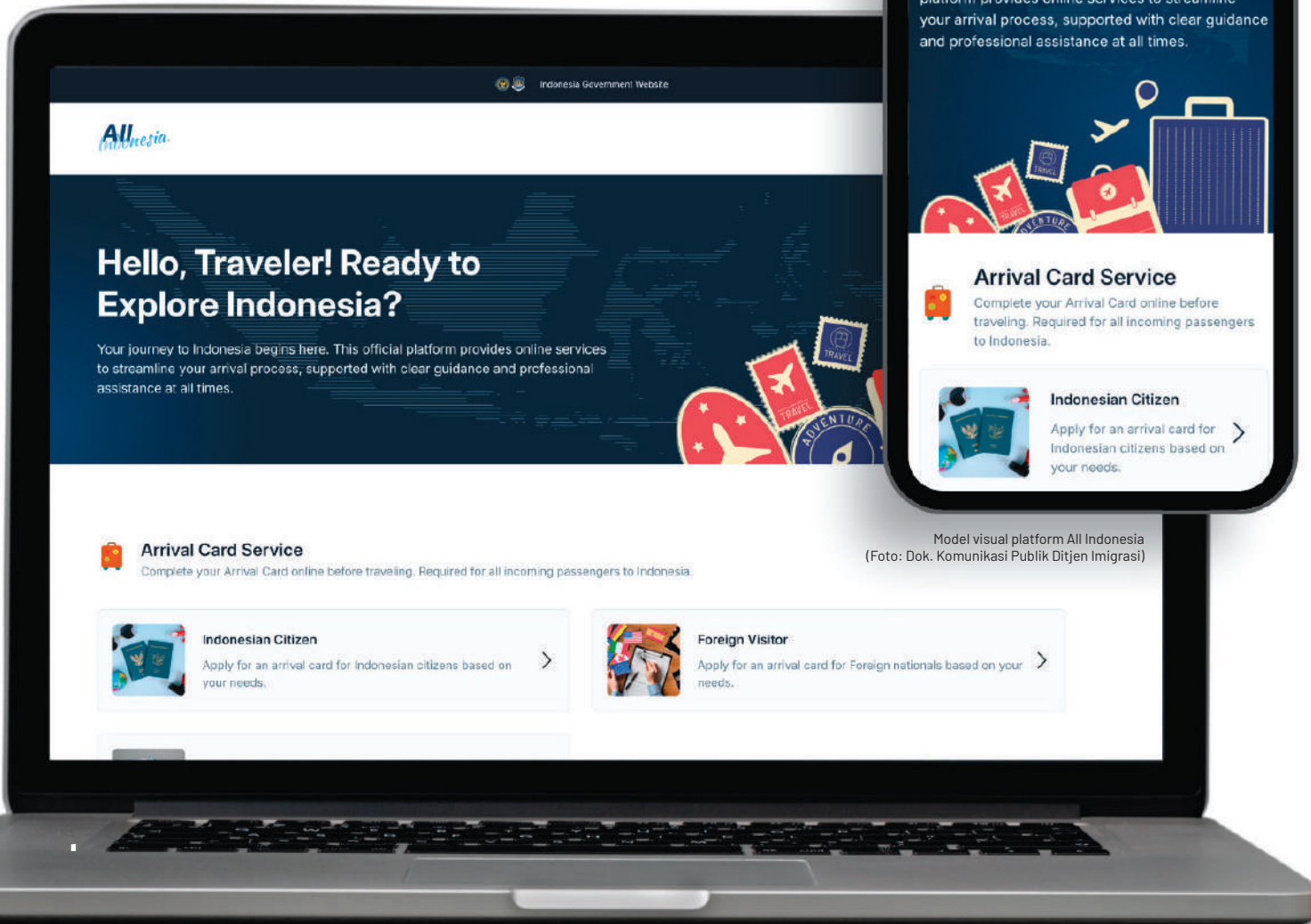
# ALL INDONESIA: SINERGI KUNCI GERBANG NEGARA

All Indonesia merupakan revolusi pelayanan publik di titik perlintasan internasional. Formulir digital ini memastikan layanan di bandara dan pelabuhan lebih efisien dan berstandar global.

Penulis: Ajeng Rahma Safitri, Elyan Nadian Zahara

**K**edatangan Camilla, seorang warga negara (WN) Prancis, di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Agustus lalu tidak lagi dibayangi kerumitan formulir berlapis.

Sebaliknya, ia justru merasa sangat terbantu dengan kehadiran petugas imigrasi yang sigap di area kedatangan. "Meskipun saya orang Prancis, di sini ada petugas yang bisa berbahasa Prancis dan membantu saya di



Model visual platform All Indonesia (Foto: Dok. Komunikasi Publik Ditjen Imigrasi)

bandara. Saya sangat terbantu dan merekomendasikan All Indonesia,” ujar Camilla lega. Pengakuan itu disampaikannya usai dibantu petugas imigrasi dalam menyelesaikan pengisian deklarasi kedatangan di platform All Indonesia. Dengan penuh inisiatif dan empati, petugas membantu Camilla mengisi deklarasi tersebut langkah demi langkah dalam bahasa Prancis.

Pengalaman Camilla merefleksikan perubahan besar yang sedang digulirkan pemerintah Indonesia di seluruh titik perlintasan internasional.

### Titik Balik Sejarah Pelayanan

Di mata dunia, bandara dan pelabuhan sebagai titik perlintasan internasional merupakan cerminan pertama wajah suatu negara. Namun, dalam sejarah pelayanan publik modern, citra ini sering terganggu oleh kemacetan proses atau *bottleneck* di area perlintasan. Antrean panjang, formulir yang berulang, dan pemeriksaan berjenjang telah lama menjadi momok bagi penumpang yang kelelahan usai menempuh perjalanan jauh.

Kondisi tersebut menjadi latar belakang pemerintah meluncurkan platform All Indonesia. Platform ini merupakan wujud sinergi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan (Kemenimipras) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi dengan instansi terkait untuk merevolusi layanan deklarasi kedatangan, menjadikannya mulus (*seamless*), efisien, dan berstandar global.

Per 1 Oktober 2025, pemerintah mewajibkan seluruh penumpang internasional—baik warga negara Indonesia (WNI) maupun warga negara asing (WNA)—untuk mengisi deklarasi kedatangan secara digital melalui satu kanal tunggal, yaitu platform All Indonesia. Kebijakan ini menjadi lompatan besar dalam implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di garis terdepan negara.

## PLATFORM ALL INDONESIA MENYATUKAN DAN MENYEDERHANAKAN PROSES DEKLARASI YANG SEBELUMNYA TERPISAH-PISAH DI EMPAT INSTANSI UTAMA.



Suasana pendampingan pengisian All Indonesia di Bandara Internasional Kualanamu, Medan (Foto: Dok. Kanim Medan)

Platform All Indonesia menghadirkan lima fitur utama yang dirancang untuk mempermudah pengguna. Kelima fitur tersebut adalah sebagai berikut.

#### 1. Kartu kedatangan daring tanpa antre

yang berlaku bagi WNI dan WNA, baik perorangan maupun kelompok

#### 2. Pengisian dan penyimpanan data otomatis

yang menyimpan data untuk kepentingan perjalanan mendatang

#### 3. Pemberitahuan waktu nyata (*real-time*)

untuk menginformasikan status dan perkembangan terbaru

#### 4. Dukungan multibahasa

dengan antarmuka dalam bahasa Indonesia, Inggris, dan Mandarin

#### 5. Pelindungan data terenkripsi

guna menjamin keamanan informasi pribadi pengguna

Dahulu, penumpang harus mengisi empat formulir berbeda dengan data yang kerap berulang, sebuah proses yang tidak efisien dan rentan terhadap kesalahan. Platform All Indonesia menyatukan dan menyederhanakan proses deklarasi yang sebelumnya terpisah-pisah di empat instansi utama, yaitu Imigrasi, Kesehatan, Karantina, serta Bea dan Cukai.

### Prosedur Pengisian

Penumpang dapat mengisi All Indonesia sejak tiga hari sebelum tanggal kedatangan di Indonesia. Pengisian dapat

dilakukan melalui situs web resmi [allindonesia.imigrasi.go.id](http://allindonesia.imigrasi.go.id) atau aplikasi ponsel. Berikut ini langkah-langkah pengisian data di platform All Indonesia.

#### 1. Akses platform dan pilih layanan

Pilih status kewarganegaraan, baik WNI maupun pengunjung asing, untuk memulai layanan Kartu Kedatangan.

#### 2. Data pribadi dan detail perjalanan

Isi semua informasi secara akurat sesuai dengan paspor, mencakup nama lengkap, nomor paspor, detail penerbangan, tanggal kedatangan, hingga tujuan dan alamat selama berada di Indonesia.

#### 3. Deklarasi kesehatan dan riwayat perjalanan

Jawab pertanyaan terkait riwayat perjalanan 21 hari terakhir dan kondisi kesehatan terkini, termasuk deklarasi barang karantina seperti hewan, ikan, atau tumbuhan.

#### 4. Deklarasi bea cukai

Deklarasikan jumlah bagasi serta barang-barang yang wajib dilaporkan, seperti uang tunai dalam jumlah besar, barang kena cukai melebihi batas, atau perangkat komunikasi yang memerlukan pendaftaran IMEI.

#### 5. Kirim formulir

Kirim (*submit*) formulir setelah semua data terisi dengan benar. Kemudian, sistem akan mengeluarkan kode QR khusus sebagai bukti sah deklarasi gabungan. Kode QR tunggal inilah



Peresmian platform All Indonesia di Bandara Internasional Soekarno-Hatta oleh kementerian terkait (Foto: Alfiqri Anshari)

yang akan ditunjukkan dan dipindai oleh petugas dari Imigrasi, Karantina, dan Bea Cukai saat tiba di bandara, menggantikan kebutuhan akan formulir fisik yang terpisah.

Setelah pengisian selesai, data penumpang langsung tersedia secara *real-time* bagi petugas keempat instansi terkait. Proses yang sebelumnya tersendat (*clunky*) dan menimbulkan *bottleneck* akibat pemeriksaan berulang kini bertransformasi menjadi pengalaman yang *seamless*—mulus, cepat, dan minim interupsi. Selain itu, data yang terpusat dan telah divalidasi turut meningkatkan keakuratannya. Hal ini menjadi faktor krusial bagi instansi terkait dalam melakukan profil risiko dan pengawasan yang lebih efektif serta terarah.

#### Kolaborasi Melebur Batas Sektoral

Dalam peluncuran nasional All Indonesia di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada Rabu (1/10), Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan apresiasi atas inovasi penting dalam pelayanan publik di pintu masuk negara ini.

“Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

siap mendukung penuh implementasi platform ini. Integrasi layanan deklarasi keimigrasian, kepabeanaan, kesehatan, dan karantina dalam satu sistem akan memberikan kemudahan bagi masyarakat, mempercepat proses kedatangan penumpang, serta memperkuat efisiensi layanan di bandara dan pelabuhan Indonesia,” kata Purbaya.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menyatakan bahwa kesan pertama suatu negara umumnya terbentuk saat seorang pelancong tiba di bandara atau pelabuhan. “Sering kali, *first impression* juga menjadi *last impression*. Oleh karena itu, jika kita ingin orang-orang dari negara lain memiliki impresi yang positif dan kembali ke Indonesia, kita harus dapat memberikan impresi positif itu sejak awal,” ujarnya.

Agus menambahkan bahwa pemerintah terus berkomitmen untuk memperbaiki layanan publik. Ia mengutip pernyataan Presiden Prabowo bahwa fondasi utama dari semua ini adalah tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), yang salah satu perwujudannya adalah tata kelola

bandara dan seluruh pintu masuk Indonesia. Inisiatif ini, tegasnya, bukan sekadar gimik, melainkan kebutuhan mendasar yang dapat menjadi *game changer* dan berperan signifikan bagi kemajuan Indonesia.

Mendukung pernyataan tersebut, Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Agus Andrianto menyampaikan, “All Indonesia adalah lompatan besar dalam pelayanan publik. Penumpang kini cukup mengisi satu deklarasi yang mempersingkat proses pemeriksaan, dan bahkan bisa menggunakan *autogate* imigrasi. Inovasi ini tidak hanya memudahkan perjalanan, tetapi juga mendukung pariwisata dan investasi di Indonesia.”

Agus juga mengimbau para penumpang untuk mengisi deklarasi melalui All Indonesia sebelum tiba di Indonesia. “Tanpa itu, perjalanan akan

**SETELAH PENGISIAN SELESAI, DATA PENUMPANG LANGSUNG TERSEDIA SECARA REAL-TIME BAGI PETUGAS KEEMPAT INSTANSI TERKAIT.**

lebih lama karena pemeriksaan harus dilakukan manual di konter,” jelasnya.

Agus menambahkan bahwa All Indonesia telah terintegrasi dengan *corridor gate* untuk pemeriksaan biometrik otomatis bagi penumpang WNI prioritas, seperti lansia, difabel pengguna kursi roda, dan anak di bawah umur tanpa pendamping. *Corridor gate* merupakan inovasi layanan *seamless immigration* tempat penumpang prioritas cukup berjalan melewati perangkat berbentuk koridor untuk menyelesaikan seluruh proses pemeriksaan imigrasi.

Dalam aspek pencegahan dan pengendalian penyakit, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan bahwa integrasi deklarasi kesehatan ke platform All Indonesia merupakan langkah strategis untuk memperkuat sistem kewaspadaan dini nasional.

“Melalui All Indonesia, Kementerian Kesehatan dapat lebih cepat mendeteksi penyakit menular atau faktor risiko yang berpotensi menimbulkan wabah. Dengan begitu, respons segera bisa dilakukan di pintu masuk negara sebelum penyakit menyebar lebih luas. Ini menjadi bagian penting dari upaya kita untuk menjaga kesehatan masyarakat secara menyeluruh,” ujar Budi.

Senada dengan pernyataan tersebut, Kepala Badan Karantina Indonesia Sahat M. Panggabean menyatakan bahwa integrasi layanan karantina ke All Indonesia tidak hanya berorientasi pada kemudahan penumpang, tetapi juga menjadi wujud sinergi untuk



WNI bisa mengakses All Indonesia di ponsel saat berada di bandara luar negeri (ilustrasi). (Foto: Arif Rahman Suryaman).

menjaga keamanan sumber daya hayati Indonesia. Integrasi ini memberikan perlindungan dari ancaman masuknya hama penyakit hewan karantina (HPHK), hama penyakit ikan karantina (HPIK), dan organisme pengganggu tumbuhan karantina (OPTK) yang berpotensi mengganggu kesehatan masyarakat dan ekosistem.

Lebih lanjut, Sahat menerangkan, “Melalui sistem ini, setiap hewan, ikan, tumbuhan, dan produk turunannya yang dibawa penumpang dari luar negeri dapat terpantau lebih awal dan data yang masuk langsung terkoneksi dengan sistem karantina. Dengan

begitu, arus penumpang tetap berjalan lancar tanpa mengurangi aspek pengawasan.”

Ia pun mengajak seluruh pelaku perjalanan untuk disiplin menggunakan platform ini. “Langkah sederhana ini sangat penting dalam melindungi negeri,” pungkasnya.

#### Didahului Fase Uji Coba

Implementasi All Indonesia dilakukan secara bertahap dan terencana guna menjamin stabilitas sistem. Fase uji coba terbatas (*pilot project*) sebagai tahap awal telah dilaksanakan sejak 18 Agustus 2025 di sejumlah pintu masuk utama yang berlalu lintas tinggi.

Lokasi uji coba meliputi sejumlah bandara internasional, seperti Bandara Internasional Soekarno-Hatta (Tangerang), Bandara Internasional Juanda (Surabaya), dan Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai (Bali), serta pelabuhan internasional di Batam. Setelah melalui masa pengujian yang cermat, Imigrasi mengumumkan implementasi nasional yang dimulai tepat pada 1 Oktober 2025. Sejak tanggal tersebut, seluruh penumpang internasional wajib mengisi deklarasi kedatangan secara eksklusif melalui All Indonesia. Seluruh instansi terkait pun berkomitmen untuk memastikan sistem berjalan stabil dengan menyiapkan dukungan teknis di seluruh tempat pemeriksaan imigrasi (TPI) selama masa transisi.

Sahabat Mido sudah pernah memakai All Indonesia? ■



Pengisian aplikasi All Indonesia oleh kru kapal ketika petugas imigrasi melaksanakan clearance (Foto: Dok. Imigrasi Tanjung Priok)

## Satu Suku, Dua Negara:

# KISAH DARI UJUNG TIMUR INDONESIA

Di wilayah perbatasan seperti Sota, praktik keimigrasian tidak bisa dilepaskan dari konteks sosial dan budaya masyarakat setempat. Inilah tantangan sekaligus peluang untuk menghadirkan pendekatan yang lebih kontekstual dan humanis.

■ Penulis: Elyan Nadian Zahara

Pukul 8.00 pagi di ujung timur Indonesia, ketika matahari baru meninggi di atas savana, Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Sota mulai menunjukkan geliatnya. Terletak sekitar 79 kilometer dari jantung Kota Merauke, Sota adalah medan tugas sunyi yang menyimpan tantangan.

Selain menjadi pintu gerbang negara yang beroperasi sejak pukul 08.00 s.d. 16.00 WIT, Sota menjadi sebuah persimpangan kultural, tempat

darah dan adat istiadat terasa jauh lebih kental daripada garis kawat perbatasan. Di sinilah, petugas setiap hari berhadapan dengan narasi rumit yang tak tercatat dalam buku panduan keimigrasian—kisah suku Kanum.

Kisah Sota tak akan lengkap tanpa membahas suku Kanum, sebuah komunitas adat yang telah hidup menyatu jauh sebelum Irian Barat diserahkan kepada Indonesia pada 1963. Wilayah adat mereka membentang

melintasi perbatasan, dari Desa Onggaya di Distrik Naukenjerai, Indonesia, hingga Distrik Mohet di Papua Nugini.

“Di Indonesia ada 8 kampung, di Papua Nugini ada 18 kampung. Secara negara, kita berbeda. Namun, secara adat, kita tetap satu Kanum,” papar Daud, seorang tetua suku Kanum sekaligus ketua lembaga masyarakat adat setempat. Bak peribahasa *darah lebih kental daripada air*, sebagian besar suku Kanum masih beranggapan ikatan kekeluargaan yang terpisah di dua negara lebih penting dibandingkan aturan negara yang berlaku.

Tugas petugas imigrasi di sini adalah berdiplomasi dengan kearifan ini, menjelaskan bahwa dokumen negara tidak akan menghilangkan



Daud, tetua suku Kanum dan ketua Lembaga Masyarakat Adat sekitar PLBN Sota (Foto: Arif Rahman Suryaman)



Suasana PLBN Sota saat pelintas menggunakan pas lintas batas (Foto: Arif Rahman Suryaman)

## SEBAGIAN BESAR SUKU KANUM MASIH BERANGGAPAN IKATAN KEKELUARGAAN LEBIH PENTING DIBANDINGKAN ATURAN NEGARA YANG BERLAKU.

identitas adat mereka, tetapi justru melindunginya di mata hukum modern.

Jika PLBN Sota adalah etalase, Desa Yanggandur adalah urat nadi perbatasan. Di desa binaan ini, Kantor Imigrasi (Kanim) Kelas II TPI Merauke—yang membawahi empat kabupaten di Papua Selatan—membina penduduk desa untuk meningkatkan literasi keimigrasian.

Sejak 2023, Kanim Merauke menambah fokus tugas ke sejumlah desa di wilayah kerja mereka. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan literasi keimigrasian warga agar taat pada aturan melintas di perbatasan.

“Kami datang sebagai mitra. [Kami] mendampingi warga, memberikan edukasi mengenai perbatasan hingga administrasi kependudukan,” tutur Charles, petugas imigrasi yang juga berasal dari suku Kanum.

Di Yanggandur, banyak warga tidak memiliki KTP, kartu keluarga (KK), bahkan buku nikah. Di mata hukum modern, mereka adalah warga negara yang tidak tercatat, sebuah ironi di tapal batas negara. Persoalan ini adalah rantai birokrasi yang sulit diputus—KTP terbit berdasarkan KK, sementara KK terbit berdasarkan buku nikah. Jika tidak ada buku nikah, rantai itu tidak tersambung. Warga terjebak dan paling rentan menderita.

Imigrasi menyadari tugas mereka tidak bisa lepas dari kehidupan sehari-hari masyarakat. Sosialisasi pas lintas batas (PLB) dan ketaatan bernegara harus dimulai dari edukasi paling mendasar. Mereka harus meyakinkan bahwa secarik akta nikah dan KTP adalah bukti kedaulatan negara yang melindungi mereka, bukan ancaman terhadap adat.

### Medan yang Menantang

Tantangan bagi petugas di Merauke tak hanya sebatas dilema adat dan administrasi. Mereka berhadapan dengan kondisi geografis ekstrem, mulai dari wilayah kerja yang luas hingga minimnya dukungan sarana prasarana dan sumber daya manusia (SDM) yang mumpuni dalam keterampilan digital.

Kepala Kantor Imigrasi (Kakanim) Merauke Zulhamsyah mengungkapkan, tidak jarang petugas mengalami ancaman serius di lapangan. Hal ini dipicu oleh adanya masyarakat perbatasan yang menganggap pemeriksaan keimigrasian—yang bagi mereka terasa seperti formalitas yang tidak perlu—sebagai gangguan.

“Peraturan yang kami terapkan tidak selalu mendapat dukungan dari masyarakat, apalagi saat melakukan pemeriksaan,” ujar Zulhamsyah. Minimnya kesadaran keimigrasian ini diperparah oleh maraknya “jalan tikus” untuk melintas tanpa pemeriksaan dari petugas.

Senada dengan Zulhamsyah, Stanlius Banggo, wakil dari Kepala Desa Yanggandur menuturkan, “Warga desa kami sering mendapati warga PNG yang kurang tertib melintas.” Ia merujuk pada kebiasaan para pelintas dari Papua Nugini yang seharusnya melalui jalur resmi PLBN Sota, tetapi malah memilih “jalan tikus” di Yaku. Praktik ini, selain mengabaikan kedaulatan, juga memunculkan kekhawatiran di kalangan warga. Mereka khawatir orang-orang Papua Nugini membawa barang-barang terlarang yang bisa mengganggu keamanan dan ketertiban desa.

Menyikapi situasi ini, Banggo menyampaikan harapan besar—agar

lebih banyak penduduk Yanggandur diberi kesempatan untuk bekerja di perbatasan Sota bukan semata karena motif ekonomi, melainkan juga untuk menguatkan pengawasan dari dalam dengan memanfaatkan pemahaman warga setempat akan medannya.

Banggo pun mengapresiasi upaya yang telah dilakukan Imigrasi. Ia mengakui bahwa Imigrasi telah beberapa kali “jemput bola” dengan datang langsung ke kampung untuk membantu warga dalam pembuatan pas lintas batas. Ini menjadi pendekatan khusus yang diterapkan oleh Kanim Merauke. Di tanah Papua, masalah tidak selalu dapat diselesaikan dengan aturan baku, tetapi harus dengan pendekatan humanis dan dekat dengan dukungan adat.

“Imigrasi yang harus jemput bola, datang ke rumah kepala suku agar mereka bisa memberikan dukungan dalam pelaksanaan tugas,” tegas Zulhamsyah.

Lebih lanjut, Zulhamsyah mengungkapkan harapannya. “Perbatasan ini adalah wajah negara. Jika tidak dijaga dan tidak diperhatikan, akan sulit bagi kami menjalankan tugas. Harapan saya besar sekali, agar kami, Imigrasi di perbatasan, mohon diperhatikan sarana dan prasarananya agar dapat menjalankan tugas dengan baik.”

Perjuangan di ujung timur Indonesia ini adalah pengingat bahwa menegakkan kedaulatan negara tak melulu soal senjata dan garis demarkasi, tetapi juga kehadiran dan empati. ■

Bangunan Sekretariat PKK Kampung Yanggandur yang menjadi Desa Binaan Kantor Imigrasi Merauke (Foto: Arif Rahman Suryaman)





Suasana antara pengajar dan para siswa di kelas Imigrasi Mengajar (Foto: Arif Rahman Suryaman)

# Dari Pos Imigrasi hingga Ruang Kelas: CERITA DARI BUPUL

Di wilayah perbatasan yang identik dengan pengawasan dan keamanan, hadir inisiatif yang memperlihatkan sisi lain dari pengabdian. Melalui program Imigrasi Mengajar, petugas imigrasi menjalankan peran edukatif yang menyentuh langsung kehidupan anak-anak di Desa Bupul.

■ Penulis: Elyan Nadian Zahara

**D**i antara hamparan luas savana dan keheningan yang membalut Desa Bupul, Papua Selatan, kehidupan mengalir lambat. Desa yang terletak di distrik perbatasan Sota, Kabupaten Merauke ini harus menghadapi tantangan pendidikan yang getir. Namun, di tengah keterbatasan itu, secercah harapan datang dari tempat yang tak terduga, Pos Imigrasi Bupul. Bukan dalam wujud pengawasan ketat perlintasan, melainkan dalam semangat berbagi ilmu melalui program Imigrasi Mengajar.

Inilah kisah tentang sisi humanis para penjaga batas negara yang mengambil peran sebagai pengajar, memberikan bekal bahasa asing

kepada 129 murid di SD YPPK Santo Petrus Bupul, satu-satunya sekolah dasar (SD) di desa tersebut.

## Oase di Tengah Gurun Pendidikan

SD YPPK Santo Petrus Bupul bukanlah sekolah kemarin sore. Ia telah berdiri sejak 1929 di bawah naungan Yayasan Pendidikan dan Persekolahan Katolik (YPPK). Usianya yang hampir seabad menyimpan sejarah panjang pengabdian sekaligus menghadapi realitas yang pelik.

Kepala Sekolah SD YPPK Santo Petrus Bupul Emmanuel Bobby adalah salah satu pilar yang menjaga asa pendidikan di Bupul. Sejak menjabat pada 2002, Bobby menjadi bagian dari perjuangan pendidikan di desa

ini. "Tantangan kami berat, terutama kekurangan tenaga pendidik dan buku mengajar yang belum terlalu memadai," ungkap Bobby.

Dengan 129 siswa, sekolah ini hanya memiliki 5 guru berstatus pegawai negeri sipil (PNS)—termasuk kepala sekolah—dan 5 guru honorer. Rasionalnya jauh dari ideal. Bahkan, sejak lama sekolah ini tidak memiliki guru Bahasa Inggris tetap. Pelajaran Bahasa Inggris hanya hadir sesekali, dibawakan oleh mahasiswa yang sedang praktik kerja lapangan (PKL), dan itu pun hanya sementara waktu.

Ironisnya, di wilayah perbatasan yang seharusnya lebih terbuka terhadap komunikasi lintas negara, kesempatan untuk menguasai bahasa

Inggris justru sedikit. Mayoritas orang tua siswa di Bupul adalah petani sehingga akses ke pendidikan tambahan pun terbatas.

“Sampai sekarang belum ada guru Bahasa Inggris. Ini menjadi kekosongan yang sangat kami rasakan. Padahal, kami ingin anak-anak di sini bisa bersaing dengan anak-anak di kota lain,” lanjut Bobby.

### Prinsip Give Back dari Penjaga Batas

Sosok sentral dari program Imigrasi Mengajar ini adalah seorang petugas imigrasi muda yang mendedikasikan waktu luangnya untuk mengajar. Selain bertanggung jawab atas tugasnya di Pos Imigrasi Bupul, ia juga ringan tangan mendermakan pengetahuannya untuk dibagikan kepada siswa di kelas-kelas SD YPPK Santo Petrus Bupul. Kristina Natasekay namanya, seorang perempuan tangguh yang lahir di Sentani, 25 tahun silam.

Ide mengajar ini tidak muncul tiba-tiba. Sebelum bergabung dengan Imigrasi pada 2025, Kristina sudah terbiasa menjadi tutor paruh waktu di panti asuhan. Setelah penempatan sebagai calon pegawai negeri sipil (CPNS) di Kantor Imigrasi Merauke dan bertugas di Pos Imigrasi Bupul, ia merasa terpanggil untuk menyalurkan bakat mengajarnya.

“Saya ingin adik-adik Papua [bisa] berbahasa Inggris supaya bisa bersaing dengan adik-adik di kota lain di Indonesia,” ujar Kris, demikian ia biasa dipanggil.

Meski masih tergolong belia, latar belakang pendidikan Kris cukup beragam. Kris pernah mengenyam bangku kuliah di Universitas Pelita Harapan, sekolah penerbangan, bahkan sempat menerima beasiswa

kuliah daring di Corban University dan George Fox University jurusan Political Science di Portland, Amerika Serikat—jajaran pengalaman yang memberinya bekal yang memadai. Meskipun tidak semua pendidikannya rampung, semangat belajar Kris tinggi hingga ia kembali berkuliah di Universitas Sains dan Teknologi Jayapura jurusan Hubungan Internasional pada 2024.

Namun, inspirasi terbesarnya sangat sederhana dan mendalam—prinsip *give back*. “Apa yang sudah saya peroleh, saya kembalikan lagi kepada masyarakat agar bisa bermanfaat,” tuturnya. Prinsip ini mengubah seragam penjaga batas menjadi kemeja guru, dan alat pengawasan menjadi kapur dan papan tulis.

### Dari Pos Imigrasi ke Ruang Kelas

Kisah Kris bermula dari perkenalan CPNS baru di Kantor Imigrasi Merauke. Ia banyak berbagi cerita dengan para senior, termasuk tentang pengalamannya mengajar dan latar belakang pendidikannya, yang kemudian membawanya bertemu dengan Kepala Pos Imigrasi Bupul David. Dukungan dari Kepala Pos dan rekan-rekan petugas di Pos Imigrasi Bupul menjadi kunci kelancaran program Imigrasi Mengajar.

Saat ini, Kris bertugas dan tinggal bersama petugas imigrasi lainnya di Pos Imigrasi Bupul yang



SD YPPK Santo Petrus Bupul yang merupakan sekolah dasar satu-satunya di Bupul (Foto: Arif Rahman Suryaman)

berjarak 186 kilometer atau sejauh tiga jam perjalanan darat dari Kantor Imigrasi Merauke. Selama masa penempatannya di Pos Imigrasi Bupul, ia bertekad untuk terus mengajar.

Di ruang kelas yang sederhana, bukan hanya dasar-dasar bahasa Inggris, Kris juga menumbuhkan rasa percaya diri siswa-siswinya melalui sesi demi sesi mengajar. Tawa dan celoteh anak-anak Papua yang mulai akrab dengan “*Good morning*” dan “*How are you?*” menjadi “upah” terindah baginya.

“Harapan saya untuk anak-anak di Desa Bupul ini, apa yang diajarkan jangan dilupakan dan dapat diaplikasikan dan bisa berguna,” katanya. “Semoga ini bisa menjadi dasar supaya mereka bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih baik.”

### Sisi Lain Penjaga Kedaulatan

Di tengah citra umum petugas imigrasi yang identik dengan birokrasi serta urusan visa, paspor, dan pengawasan di perbatasan, petugas di tapal batas Merauke menunjukkan dimensi lain dari pengabdian negara—sisi humanis yang peduli pada pengembangan sumber daya manusia. Selain menjaga kedaulatan, mereka juga berinvestasi pada potensi generasi muda melalui program Imigrasi Mengajar. Inisiatif ini menjadi pesan kuat bahwa pengabdian tidak harus berhenti di meja kantor atau garis perbatasan, tetapi dapat diwujudkan melalui aksi berbagi yang didasari hasrat luhur untuk memajukan masyarakat dan berkontribusi dalam membentuk karakter dan kecerdasan generasi penerus bangsa.

Kini, berkat inisiatif tersebut, Emmanuel Bobby dan 129 siswa SD YPPK Santo Petrus Bupul memiliki bekal tambahan berupa kemampuan bahasa Inggris dan semangat baru untuk menatap masa depan. ■



Para murid kelas 4, 5, dan 6 yang mengikuti kelas Imigrasi Mengajar English by Immigration (EBI) (Foto: Arif Rahman Suryaman)



# MENYAMBUT ERA BARU HUKUM PIDANA INDONESIA

Gantikan hukum warisan kolonial, KUHP baru siap dilaksanakan pada 2026. Hukum pidana Indonesia kini mengakui *living law* dan mereposisi pidana mati sebagai jalan terakhir.

■ Penulis: Faris Agung Wicaksono

Indonesia sedang membuka babak baru dalam sejarah hukum. Pada 2 Januari 2026, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru akan resmi berlaku, menggantikan kitab hukum warisan kolonial Belanda yang telah digunakan selama beberapa dekade.

Disahkan melalui Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2023, penggantian ini bukan sekadar perubahan peraturan, melainkan juga lompatan fundamental untuk membangun sebuah sistem hukum pidana yang berakar pada nilai-nilai Pancasila dan identitas kebangsaan Indonesia.

Pengesahan KUHP baru pada 2023 menandai langkah strategis Indonesia untuk meninggalkan warisan hukum kolonial. Langkah ini beralih ke kerangka hukum yang selaras dengan karakter bangsa, kearifan lokal, dan prinsip-prinsip negara kesatuan. Sejumlah perubahan mendasar membedakan KUHP baru dari kitab hukum sebelumnya, mencakup pengakuan terhadap hukum hidup dalam masyarakat (*living law*) serta mereposisi pidana mati sebagai sanksi yang bersifat khusus.

mengenai tujuan ketentuan ini dalam kuliah umum “Training of Facilitator KUHP” di BPSDM Hukum, Selasa (16/9). “Keberlakuan *living law* sama sekali tidak dimaksudkan untuk menghidupkan hukum adat yang sudah mati, tetapi untuk melegalkan pranata hukum adat yang masih hidup,” ujarnya.

Penerapan *living law* dalam KUHP baru dibatasi hanya untuk tindak pidana ringan yang belum diatur dalam hukum pidana nasional. Lebih lanjut, konsep ini bertujuan untuk mewujudkan asas keadilan dan keseimbangan, yang mana *living law* tidak hanya dapat menjadi dasar untuk menjatuhkan pidana, tetapi juga untuk membebaskan seseorang dari pertanggungjawaban pidana. Penting untuk dicatat, kewenangan untuk mengadili suatu perkara tetaplah berada di tangan pengadilan negeri sebagai peradilan umum, bukan pada lembaga adat.

KUHP baru juga mengadopsi prinsip keadilan restoratif secara kuat. Prinsip ini mengutamakan pemulihan hubungan dan keseimbangan yang terganggu akibat suatu tindak pidana sebagai alternatif dari pendekatan retributif yang hanya berfokus pada penghukuman pelaku. Wujud nyata dari prinsip ini adalah diperkenalkannya pidana kerja sosial sebagai sanksi alternatif pengganti hukuman penjara untuk tindak pidana tertentu, yang diatur dalam Pasal 65 ayat (1) huruf e serta Pasal 82 hingga Pasal 87.

Tujuan pemberian alternatif hukuman selain penjara adalah untuk mengatasi kepadatan (*overcrowding*) di lembaga pemasyarakatan. Selain itu, sanksi ini dirancang agar lebih bermakna bagi masyarakat luas sekaligus melindungi masa depan pelaku tindak pidana. Dengan demikian, proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial diharapkan dapat berlangsung lebih efektif.

### Reposisi Pidana Mati dan Jerat Hukum untuk Korporasi

Perubahan signifikan lainnya dalam KUHP baru terkait dengan pengaturan pidana mati. Pidana mati kini direposisi dari pidana pokok menjadi pidana khusus yang bersifat *ultimum remedium* atau upaya terakhir. Aturan ini memperkenalkan masa percobaan sepuluh tahun bagi terpidana mati untuk menunjukkan perubahan perilaku. Berdasarkan pertimbangan Mahkamah Agung, pidana mati dapat diubah menjadi pidana seumur hidup

melalui Keputusan Presiden setelah masa percobaan tersebut berakhir.

Selain itu, KUHP baru juga memuat terobosan penting melalui pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam Pasal 45 hingga Pasal 50. Ketentuan ini secara tegas mengakui badan hukum sebagai subjek hukum pidana. Dengan demikian, korporasi tidak dapat lagi bersembunyi di balik struktur organisasinya untuk menghindari pertanggungjawaban pidana. Pengaturan ini diharapkan dapat memberikan efek jera sekaligus mendorong praktik bisnis yang lebih bertanggung jawab, transparan, dan beretika.

### Sosialisasi dan Penguatan Kapasitas Penegak Hukum

Menjelang pemberlakuan KUHP baru pada 2026, persiapan untuk sosialisasi dan penguatan kapasitas aparat penegak hukum menjadi kunci utama. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) telah mengambil peran sentral dalam proses ini. Sebagai langkah nyata, pada 4 Agustus 2024, BPSDM Hukum dan HAM menyelenggarakan “Training of Facilitator Angkatan V” untuk memperkuat jejaring fasilitator hukum nasional dalam memahami dan menyosialisasikan KUHP baru secara komprehensif.

Dalam kesempatan itu, Kepala BPSDM Hukum dan HAM Gusti Ayu Putu Suwardani menekankan pentingnya pemahaman mendalam terhadap nilai-nilai filosofis yang mendasari undang-undang ini. “Kita ingin masyarakat tak hanya tahu isi KUHP, tetapi [juga] paham nilai-nilai keadilannya,” ujarnya.

Dengan semangat untuk mencetak ribuan agen perubahan hukum, diharapkan setiap fasilitator dapat melahirkan gerakan masif menuju penerapan KUHP baru yang inklusif dan berkeadilan.

KUHP baru diharapkan mampu menjawab berbagai tantangan penegakan hukum di Indonesia. Keberadaannya diharapkan dapat mewujudkan sistem hukum yang lebih adil, berpijak pada nilai-nilai lokal, serta mendorong perubahan positif dalam masyarakat. Pada hakikatnya, KUHP baru ini bukan sekadar peraturan tertulis, melainkan perwujudan keadilan yang berlandaskan Pancasila dan budaya bangsa. ■

Dewi Keadilan (ilustrasi) (Sumber: ahliahukumindonesia.com)

### Living Law dan Keadilan Restoratif

Salah satu terobosan penting dalam KUHP baru adalah pengakuan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat atau *living law* yang diatur dalam Pasal 2. Ketentuan ini secara resmi mengakui norma-norma hukum tidak tertulis yang telah berkembang dan diakui dalam komunitas tertentu.

Namun, penerapan *living law* ini dibatasi oleh beberapa ketentuan. Hukum adat harus diformalisasi melalui peraturan daerah (perda) dan tidak boleh bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya, hak asasi manusia (HAM), serta asas-asas umum dalam negara yang beradab.

Prof. Edward Omar Sharif Hiariej memberikan penjelasan tegas

## Passenger Analysis Unit:

# TEKNOLOGI KEAMANAN PERBATASAN BERBASIS MAHADATA DAN AI

Dengan teknologi mahadata dan pengenalan wajah, PAU dapat mendeteksi penumpang berisiko sebelum pesawat mendarat. Layanan imigrasi menjadi lebih cepat dan fokus pada ancaman yang sesungguhnya.

■ Penulis: Alvie Mubariq Ali

Unit Analisis Penumpang (Passenger Analysis Unit/PAU) di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Soekarno-Hatta merupakan garda terdepan dalam menjaga gerbang negara dengan pendekatan yang berbeda secara fundamental dari pemeriksaan konvensional. Berbeda dengan petugas di konter tempat pemeriksaan imigrasi (TPI) yang melakukan pemeriksaan dokumen dan wawancara penumpang secara langsung (*frontline check*), PAU justru beroperasi di belakang layar.

Tugas utama PAU adalah melakukan analisis data penumpang secara komprehensif dan preemtif dengan deteksi dini, jauh sebelum penumpang tiba di konter atau *autogate*. Dengan mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data—termasuk pemeriksaan forensik terhadap dokumen yang mencurigakan—PAU dapat mengidentifikasi penumpang berisiko tinggi tanpa mengganggu kelancaran arus lalu lintas penumpang.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Soekarno-Hatta Galih Priya Kartika Perdhana menekankan peran krusial unitnya dalam melayani volume penumpang internasional bandara yang sangat tinggi. "Tantangan terbesar kami adalah jumlah penumpang yang besar serta kebutuhan untuk mengambil keputusan cepat tanpa mengganggu kelancaran arus penumpang," ujarnya.

Guna mengatasi tantangan itu, PAU mulai menerapkan teknologi profil berbasis mahadata (*big data*) yang mengintegrasikan berbagai sistem, seperti aplikasi perlintasan keimigrasian, manifes maskapai, Sistem

Informasi Profil Penumpang (SIPP), dan sistem pengenalan wajah (*face recognition*).

Secara berurutan, alur kerja PAU dimulai dari tahap prakedatangan (*pre-arrival*). Pada tahap ini, sistem menganalisis kecocokan wajah pelaku perjalanan dengan data orang yang tercatat dalam daftar cegat, tangkal, atau Red Notice Interpol. Berdasarkan analisis itu, sistem akan mengirimkan peringatan kepada petugas imigrasi di lapangan untuk mengidentifikasi subjek yang menjadi perhatian (*subjek of interest*) yang memerlukan pemeriksaan lebih lanjut.

"Jika ada indikasi kuat, PAU merekomendasikan agar penumpang tersebut dilakukan *secondary check* berupa wawancara mendalam dan pemeriksaan dokumen forensik," jelas Galih. Sistem terintegrasi ini mampu menyaring penumpang yang memiliki pola perjalanan mencurigakan atau terindikasi terkait daftar pencarian orang sehingga akurasi analisis pun meningkat secara signifikan.

### Strategi, Tantangan, dan Kontribusi PAU

Efektivitas PAU bertumpu pada optimalisasi data. Unit ini mengintegrasikan data dari berbagai sumber, baik internal maupun lintas instansi, untuk menyusun profil risiko yang komprehensif. Sebagai contoh, data *passenger name record* (PNR) dan *Advance Passenger Information* (API) dijadikan basis untuk melacak identitas dan riwayat perjalanan.

"Sementara itu, data dari Interpol, Bea Cukai, hingga Densus 88 menjadi

unsur tambahan untuk mendeteksi penumpang yang memiliki catatan kriminal, potensi ancaman terorisme, atau keterkaitan dengan jaringan transnasional. Sinergi data ini memungkinkan PAU menyusun profil risiko dengan lebih komprehensif," kata Galih.

Efektivitas kerja PAU diukur melalui sejumlah indikator kinerja utama (KPI), seperti persentase penumpang yang menghasilkan temuan risiko atau *hit alert* yang valid, jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti menjadi *secondary*



Sumber: freepik.com

check, ketepatan analisis forensik dokumen perjalanan, serta waktu rata-rata analisis data. Sebagai contoh kasus *high-profile*, Galih berbagi tentang keberhasilan unitnya. "Salah satu contoh kasus adalah ketika PAU berhasil mendeteksi lebih awal adanya penumpang yang termasuk dalam daftar cegah dan tangkal (cekal). Petugas dapat melakukan antisipasi dengan lebih mengamati pergerakan penumpang dan meningkatkan kewaspadaan dalam proses pemeriksaan keimigrasian," ungkapnya.

Selain imigran ilegal, PAU kerap mendeteksi dan mencegah beragam kejahatan lintas negara, mulai dari dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO), kejahatan perbankan, hingga *scamming*. Namun, pola kejahatan ini bergeser pascapandemi Covid-19. "Pascapandemi, pola kejahatan berubah. Penyalahgunaan visa elektronik, penggunaan dokumen palsu, serta modus tinggal lajak (*overstay*) untuk bekerja ilegal meningkat tajam. PAU mengantisipasi hal ini dengan memperkuat analisis terhadap tujuan

perjalanan dan konsistensi dokumen pendukung," jelas Galih.

Dengan adanya PAU, petugas juga dituntut untuk memiliki keterampilan khusus yang multidisiplin. Secara teknis, mereka harus mampu mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis mahadata, serta membuat kajian dan rekomendasi. Di bidang teknologi, dibutuhkan pemahaman mendalam tentang teknologi informasi dan sistem aplikasi pendukung. Sementara itu, dari aspek substansi, analis harus menguasai pengetahuan mengenai isu politik, hukum, dan keamanan global. Tak kalah penting, keahlian dalam pemeriksaan forensik dokumen dan pemahaman mengenai psikologi untuk membaca pola perilaku mencurigakan juga merupakan kompetensi wajib.

Dalam upaya global, PAU Soekarno-Hatta aktif berkoordinasi dengan mitra internasional, termasuk Interpol, melalui pertukaran data intelijen dan *watchlist*. Keaktifannya dalam forum multilateral juga difokuskan pada pemberantasan jaringan penyelundupan

manusia (*people smuggling*) dan terorisme. "Dengan cara ini, PAU tidak hanya berperan lokal, tetapi juga menjadi bagian dari jejaring keamanan global," tutur Galih.

Dalam lima tahun ke depan, PAU telah menyiapkan strategi yang mencakup penguatan analisis risiko digital, peningkatan kapabilitas forensik dokumen elektronik, serta perluasan kerja sama intelijen.

Kontribusi PAU tidak hanya pada aspek keamanan, tetapi juga pada peningkatan efisiensi layanan Imigrasi Soekarno-Hatta. Galih menjelaskan, bahwa selain fokus pada pencegahan, PAU juga berkontribusi pada efisiensi layanan melalui analisis awal yang akurat yang memungkinkan penumpang berisiko rendah diproses lebih cepat di konter TPI.

"Ini menciptakan alur antrean yang lancar bagi penumpang reguler, sementara energi dan waktu petugas difokuskan pada penumpang dengan risiko tinggi. Dengan begitu, aspek keamanan dan pelayanan publik dapat berjalan beriringan," tutup Galih. ■



# Imigrasi Catat 1.012 *Golden Visa* Diterbitkan, **SUMBANG INVESTASI RP48 TRILIUN**

Saat ini, 61 negara memegang *golden visa* untuk berinvestasi di Indonesia. Penerbitan *golden visa* ini menyumbang PNBPN sebesar Rp12,96 miliar terhitung hingga 23 September 2025.

■ Penulis: Ajeng Rahma Safitri

**C**apaian signifikan dicatatkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi dalam program Golden Visa. Hingga 23 September, sebanyak 1.012 *golden visa* telah diterbitkan dengan nilai investasi lebih dari Rp48 triliun.

Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi Yuldi Yusman

menyebutkan bahwa capaian ini menunjukkan kepercayaan masyarakat internasional terhadap iklim investasi di Indonesia.

"*Golden visa* Indonesia merupakan salah satu program unggulan Ditjen Imigrasi yang diharapkan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Hal ini sejalan

dengan fungsi keimigrasian sebagai fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat," ujarnya pada Kamis (25/9). Yuldi menambahkan, selain nilai investasi, penerbitan *golden visa* juga menyumbang penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp12,96 miliar terhitung hingga 23 September 2025.

Saat ini, pemegang *golden visa* berasal dari 61 negara. Keragaman negara ini membuktikan bahwa berinvestasi dan tinggal di Indonesia menggunakan *golden visa* memberikan kenyamanan dan menjadi daya tarik tersendiri bagi warga negara asing (WNA).

Jenis visa *second home* menjadi yang paling banyak diterbitkan, yaitu 468 visa. Selain itu, Amerika Serikat, Tiongkok, dan Taiwan tercatat sebagai tiga besar negara dengan pemegang *golden visa* terbanyak. Secara terperinci, kontribusi terbesar terhadap nilai investasi berasal dari perusahaan asing yang mendirikan cabang perusahaannya di Indonesia dengan nilai hampir Rp46,5 triliun, atau sekitar 96% dari total investasi. Sementara itu, nilai investasi dari investor individu yang menanamkan modalnya di Indonesia adalah Rp 249,3 miliar, serta investasi dari subjek *golden visa* lainnya senilai Rp1,45 triliun.

Yuldi menjelaskan, *golden visa* merupakan izin tinggal yang diberikan kepada WNA dengan kategori tertentu, seperti investor, orang asing dengan keahlian khusus, tokoh dunia, hingga eks-WNI dan keturunannya. *Golden visa* yang berlaku 5 hingga 10 tahun ini menawarkan sejumlah keunggulan bagi pemegangnya. Pemegang visa ini mendapatkan akses jalur prioritas di bandara, kemudahan layanan keimigrasian, serta kepastian nasional untuk berinvestasi dan berkarya di Indonesia.

"Capaian *golden visa* hingga September 2025 ini menunjukkan bahwa Indonesia makin menarik bagi investor dan talenta global. Kami berharap tren positif ini terus berlanjut sehingga dapat mendukung pembangunan nasional dan memperkuat perekonomian Indonesia," tutup Yuldi. ■



Sumber: freepik.com

**E**mpat warga negara asing asal Bangladesh diamankan Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian (Inteldakim) karena masuk ke Indonesia secara ilegal dan tanpa dokumen perjalanan. Pengamanan ini dilakukan sebagai tindak lanjut atas laporan dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Garut, yang merupakan anggota Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) setempat, pada Jumat (26/9).

Keempat WN Bangladesh berinisial R, A, HA, dan SM itu sebelumnya diamankan oleh Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Trantibum) Kecamatan Cikelet serta Kepolisian Sektor (Polsek) Cikelet. Pengamanan dilakukan di Kantor Kecamatan Cikelet setelah mereka menolak membayar biaya penginapan di sebuah hotel di wilayah tersebut. Selanjutnya, mereka diserahkan kepada Seksi Inteldakim Kantor Imigrasi Tasikmalaya untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, keempat WN Bangladesh tersebut masuk ke wilayah Indonesia secara tidak sah (*illegal entry*) tanpa melalui pemeriksaan imigrasi di tempat pemeriksaan imigrasi (TPI). Mereka mengaku berangkat dari Bangladesh menggunakan perahu nelayan, menempuh perjalanan sekitar sepuluh hari, dan mendarat di sebuah pesisir pantai di Pulau Sumatra. Keempatnya mengaku hanya berniat transit di Indonesia sebelum melanjutkan perjalanan ke negara tujuan, yaitu Malaysia.

Keempatnya terancam deportasi karena diduga melanggar Pasal 119

Kepala Kantor Imigrasi Tasikmalaya menunjukkan barang bukti kepada wartawan. (Foto: Dok. Kanim Tasikmalaya)



Konferensi pers penangkapan 4 WN Bangladesh oleh Kantor Imigrasi Tasikmalaya (Foto: Dok. Kanim Tasikmalaya)

## Menginap dan Tidak Mau Bayar, 4 WN BANGLADESH DIGANJAR DEPORTASI

Empat warga Bangladesh diamankan karena menyusup lewat jalur laut selama 10 hari dengan perahu nelayan. Keempatnya terancam dideportasi oleh Kantor Imigrasi Kelas I Non-TPI Tasikmalaya.

■ Penulis: Bambang Nur Jamin

ayat (1) dan Pasal 113 Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Pelanggaran tersebut berupa masuk ke wilayah Indonesia tanpa melalui TPI serta tidak memiliki dokumen perjalanan dan visa yang sah. Untuk sementara waktu, R, A, HA, dan SM ditempatkan di ruang detensi Kantor Imigrasi Tasikmalaya.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non-TPI Tasikmalaya Indra Bangsawan menyatakan bahwa Indonesia menerapkan *selective policy*. "Indonesia mengimplementasikan *selective policy*, jadi hanya orang asing yang memberi manfaat yang bisa masuk dan tinggal di Indonesia. Jadi, kalau mereka di sini tidak patuh dan malah mengganggu keamanan dan ketertiban umum, untuk apa?" tegasnya.

Lebih lanjut, Indra menyatakan bahwa langkah-langkah strategis telah diambil untuk mencegah terulangnya kasus serupa. Langkah-langkah tersebut berupa sosialisasi kepada pemilik dan pengelola akomodasi, seperti hotel dan penginapan, agar wajib melaporkan keberadaan WNA yang menginap. Selain itu, akan dilakukan penguatan peran TIMPORA di seluruh wilayah kerja Kantor Imigrasi Tasikmalaya.

"[Ucapan] terima kasih serta apresiasi setinggi-tingginya [saya sampaikan] kepada seluruh pihak, termasuk Polsek Cikelet, Kantor Kecamatan Cikelet, maupun pihak lainnya yang telah mendukung serta membantu proses pengamanan empat orang WN Bangladesh tersebut," tutup Indra. ■

# Menyalahgunakan VoA untuk Ikut Pelatihan Kerja, 4 WN INGGRIS DIDEPORTASI

Empat WN Inggris dideportasi sebagai hasil operasi pengawasan keimigrasian yang berawal dari laporan masyarakat dan penyelidikan petugas. Operasi ini sekaligus menegaskan komitmen Imigrasi dalam menindak tegas penyalahgunaan izin tinggal oleh warga asing.

■ Penulis: Bhimsa Sanlito Satriavi Pratama

**K**antor Imigrasi Kelas I Khusus Non-TPI Tangerang mendeportasi empat warga negara (WN) Inggris pada Kamis (4/9) lalu karena terbukti menyalahgunakan izin tinggal. Keempatnya diamankan dalam operasi pengawasan keimigrasian di wilayah Tangerang dan Tangerang Selatan. Operasi ini merupakan tindak lanjut dari laporan masyarakat dan hasil penyelidikan Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian (Inteldakim) terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh warga negara asing (WNA).

"Tim kami telah melakukan pengawasan di beberapa lokasi, mulai dari gedung perkantoran di Pondok Aren hingga tiga apartemen di wilayah Kota Tangerang dan Tangerang Selatan," ujar Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non-TPI Tangerang Hasanin dalam keterangannya pada Senin (8/9).

Empat WN Inggris yang dideportasi diidentifikasi dengan inisial JPT, KJM, OTB, dan AJC. Keempatnya telah dikenakan tindakan administratif keimigrasian (TAK) berupa deportasi dan penangkalan. Penindakan ini dilakukan karena mereka terbukti melanggar Pasal 122 huruf a Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yang melarang pemegang izin tinggal kunjungan untuk bekerja.

Kepala Bidang Inteldakim Bong Bong Prakoso Napitupulu menjelaskan bahwa dari hasil pemeriksaan intensif, keempat WN Inggris tersebut masuk ke Indonesia menggunakan *visa on arrival* (VoA). Penggunaan visa ini dibatasi hanya untuk tujuan wisata,

mengunjungi keluarga, atau kegiatan nonkerja lainnya.

"Namun, berdasarkan temuan dan pemeriksaan petugas, keempat WN

Inggris ini ternyata calon tenaga kerja asing (TKA) yang sedang mengikuti pelatihan sebagai *sales* investasi di Indonesia," jelas Bong Bong.

Bong Bong menambahkan, selama masa pelatihan, mereka mendapatkan berbagai fasilitas, upah, dan imbalan. "Mereka menerima fasilitas seperti konsumsi, tempat tinggal, transportasi, serta upah sebesar 200 dolar Amerika Serikat (AS) per minggu," ujarnya.

Hal ini, menurutnya, jelas bertolak belakang dengan Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Nomor M.IP-08.GR.01.01 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Visa.

"Keempat WNA tersebut telah dideportasi untuk kembali ke negara asal pada Kamis (4/9) pukul 20.15 WIB menggunakan maskapai Singapore Airlines (SQ 967) dengan tujuan Singapura, kemudian dilanjutkan ke London dan Manchester, Inggris. Tentunya, mereka juga masuk ke daftar penangkalan sehingga tidak dapat memasuki wilayah Indonesia dalam kurun waktu tertentu," tutup Hasanin. ■

WN Inggris yang dideportasi Imigrasi Tangerang karena pelanggaran izin tinggal (Foto: Dok. Kanim Tangerang)





Pemeriksaan MK, WN Polandia yang menggalang dana secara ilegal di Indonesia (Foto: Dok. Kanim Bima)

# Galang Dana Ilegal, WN POLANDIA DIDEPORTASI KANTOR IMIGRASI BIMA

Satu warga negara Polandia dipulangkan ke negaranya setelah terbukti melakukan pelanggaran hukum keimigrasian Indonesia.

■ Penulis: I Made Donik Brahmadi Putra Ardika

**K**antor Imigrasi Kelas II Non-TPI Bima mendeportasi seorang warga negara (WN) Polandia berinisial MK. Tindakan ini diambil setelah MK terbukti melakukan penyalahgunaan izin tinggal dengan menggalang dana secara ilegal selama berada di Indonesia. Pelaku berhasil mengumpulkan donasi sebesar 2.894 dolar Amerika Serikat (AS) atau setara dengan sekitar Rp47 juta. Deportasi dilakukan pada Rabu (23/7) melalui Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali, menuju Gdańsk, Polandia.

Kepala Kantor Imigrasi Bima Joko Widodo menjelaskan kronologi penindakan ini. "Kami menerima laporan dari masyarakat terkait aktivitas penggalangan dana yang dilakukan oleh MK melalui media sosial dan situs GoFundMe. Laporan tersebut menyebutkan bahwa MK yang tinggal di kawasan Lakey, Dompus, melakukan aktivitas yang mencurigakan," ujarnya.

Setelah menerima laporan, tim Imigrasi Bima segera melakukan penyelidikan. Dari hasil penyelidikan tersebut, diketahui bahwa MK

**"KAMI MENGAJAK SELURUH MASYARAKAT UNTUK MELAPORKAN JIKA MENEMUKAN PELANGGARAN ATAU AKTIVITAS MENCURIGAKAN YANG DILAKUKAN OLEH WNA."**

menggunakan izin tinggal terbatas (ITAS) *remote worker* dengan indeks E33G. Izin ini hanya diperuntukkan bagi pekerja jarak jauh yang memiliki perusahaan di luar negeri.

Joko menambahkan bahwa aktivitas ilegal MK telah berlangsung cukup lama. "Sejak Desember 2024 hingga April 2025, MK telah menerima donasi hampir 3.000 dolar AS yang masuk ke rekening pribadi berbentuk dompet digital. Seluruh aktivitas penggalangan dana ini dilakukan tanpa izin dari instansi terkait, termasuk Kementerian Sosial," jelasnya.

MK telah melakukan pelanggaran hukum keimigrasian karena aktivitasnya di Indonesia tidak sesuai dengan peruntukan izin tinggal yang dimiliki. Akibatnya, MK dikenakan tindakan administratif keimigrasian (TAK) berupa deportasi. Tindakan deportasi ini sesuai dengan Pasal 75 ayat 1 Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang mengatur sanksi bagi warga negara asing (WNA) yang melakukan pelanggaran keimigrasian.

Proses pemulangan MK berjalan lancar. Ia memulai perjalanannya dari Bandara Sultan Muhammad Salahudin, Bima menuju Denpasar, Bali untuk meninggalkan wilayah Indonesia dengan penerbangan KLM menuju Polandia. Proses ini dilakukan dengan pengawasan ketat dari petugas imigrasi.

Penegakan hukum terhadap MK adalah bagian dari komitmen pemerintah untuk menjaga kedaulatan dan ketertiban di wilayah Indonesia. Joko pun mengimbau masyarakat untuk terus berperan aktif dalam pengawasan keberadaan dan aktivitas orang asing.

"Kami mengajak seluruh masyarakat untuk tidak ragu melaporkan jika menemukan indikasi pelanggaran atau aktivitas mencurigakan yang dilakukan oleh WNA. Laporan yang diberikan akan segera kami tindak lanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penegakan hukum ini adalah wujud nyata dari komitmen kami untuk menjaga kedaulatan negara dan memastikan setiap orang mematuhi aturan yang ada," pungkasnya. ■

**P**embentukan Satuan Tugas (Satgas) Patroli Imigrasi di Bali merupakan langkah penting untuk memulihkan citra pariwisata Pulau Dewata yang tercoreng oleh berbagai pelanggaran hukum dari warga negara asing (WNA). Keberhasilan langkah ini terbukti dari data analisis pemantauan media terbaru Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi yang menunjukkan lonjakan signifikan dalam sentimen positif publik terhadap penanganan WNA pascaoperasi Satgas.

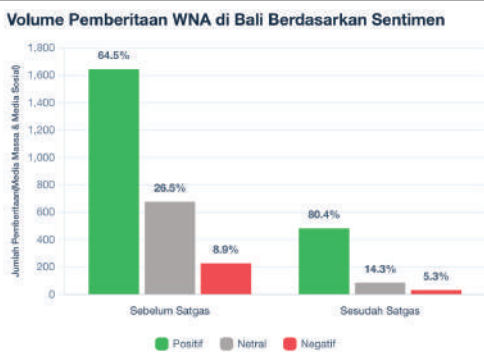
Analisis terhadap pemberitaan media sosial mencatat lonjakan drastis sentimen positif terhadap kinerja Imigrasi di Bali. Angkanya meningkat dari 64,5% sebelum Satgas Patroli Imigrasi dibentuk menjadi 80,4% setelah satgas tersebut beroperasi. Hal ini menunjukkan peningkatan sebesar hampir 16% poin.

Sebaliknya, sentimen negatif berhasil ditekan hingga tersisa 5,3%. Angka ini turun tajam dari posisi sebelumnya, yaitu 8,9%. Peningkatan sentimen positif dan penurunan sentimen negatif ini menjadi indikator kuat atas keberhasilan inisiatif yang diresmikan langsung oleh Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan (Imipas) Agus Andrianto dalam upaya memulihkan ketertiban.

Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi Yuldi Yusman menegaskan bahwa langkah proaktif ini merupakan bagian dari komitmen berkelanjutan pemerintah dalam rangka menjaga stabilitas dan keamanan nasional.

“Ke depannya, kami akan terus menggiatkan operasi serupa, baik dalam skala lokal seperti patroli rutin Satgas Patroli, maupun skala nasional

Grafik pemantauan media pemberitaan WNA di Bali (Foto: Dok. Komunikasi Publik Ditjen Imigrasi)



Catatan: Sentimen Penangkapan/Deportasi WNA masuk dalam kategori **Positif** bagi Ditjen Imigrasi. Sumber data terhitung 1 Januari 2025 s/d 28 September 2025



Pemeriksaan acak (random check) WNA oleh Satgas Patroli Imigrasi (Foto: Dok. Komunikasi Publik Ditjen Imigrasi)

## Menjaga Wibawa Pulau Dewata: **SATGAS PATROLI IMIGRASI TINGKATKAN SENTIMEN POSITIF**

Satgas Patroli Imigrasi yang baru dibentuk menindak tegas pelanggaran oleh WNA di Bali. Hal ini memperkuat posisi Pulau Dewata sebagai destinasi yang tidak hanya indah, tetapi juga aman, tertib, dan patuh hukum.

■ Penulis: Adi Prasetyo

seperti Operasi Wira Waspada,” ujar Yuldi pada Rabu (23/10).

Menurut Yuldi, upaya penertiban ini memiliki cakupan yang sangat lebih luas daripada sekadar penegakan hukum. Langkah ini juga bertujuan memulihkan kepercayaan publik terhadap institusi Imigrasi.

“Ini untuk membantu menjaga stabilitas keamanan nasional, memberikan efek cegah agar tidak terjadi pelanggaran, serta menjaga kepercayaan kepada publik terhadap Imigrasi,” imbuhnya.

Sebelum Satgas Patroli Imigrasi Bali dibentuk, pemberitaan media didominasi oleh narasi yang meresahkan mengenai pelanggaran hukum yang dilakukan WNA, mulai dari kasus lalu lintas hingga masalah visa. Situasi tersebut menciptakan persepsi

lemahnya pengawasan dan secara perlahan mengikis kepercayaan publik serta citra Bali sebagai destinasi wisata kelas dunia yang tertib.

Kini, dengan pendekatan yang lebih proaktif, terstruktur, dan tegas, Satgas Patroli Imigrasi Bali dinilai berhasil membalikkan keadaan. Keberhasilan awal ini menjadi cetak biru bagi sebuah tatanan baru, yaitu ketika penegakan aturan yang konsisten berjalan seiring dengan keramahan khas Bali. Kombinasi ini memperkuat posisi Pulau Dewata sebagai destinasi yang tidak hanya indah, tetapi juga aman, tertib, dan patuh hukum.

Oleh karena itu, konsistensi operasi dan kemampuan beradaptasi terhadap modus pelanggaran baru akan menjadi kunci untuk menjaga momentum reformasi yang berkelanjutan. ■

# Langgar Izin Tinggal, 43 WNA PEKERJA KELAB MALAM DIAMANKAN IMIGRASI

Penindakan penyalahgunaan izin tinggal kembali dilakukan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi. Operasi ini menjadi bukti konsistensi pemerintah dalam mengawasi keberadaan warga negara asing (WNA) di Indonesia.

■ Penulis: Ajeng Rahma Safitri

**D**irektorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi mengamankan 43 warga negara asing (WNA) dalam operasi keimigrasian di tempat hiburan malam di Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara pada Selasa (14/10). Operasi ini dilakukan setelah adanya informasi yang diterima pada Jumat sebelumnya (10/10) terkait

dugaan penyalahgunaan izin tinggal oleh sejumlah WNA di lokasi tersebut.

“Operasi ini kami lakukan untuk memastikan izin tinggal WNA digunakan sesuai peruntukannya. Dari hasil pemeriksaan awal, kami mendapati sejumlah orang asing bekerja tanpa izin tinggal yang sah,” ujar Plt. Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi Yuldi Yusman.

Penangkapan 43 WNA di tempat hiburan malam di kawasan Jakarta Utara (Foto: Dok. Ditjen Imigrasi)



Penempatan para WNA pelanggar izin tinggal di ruang detensi Direktorat Jenderal Imigrasi (Foto: Dok. Ditjen Imigrasi)

Tim yang berjumlah 16 petugas dari Subdirektorat Pengawasan Keimigrasian melakukan penyisiran di lokasi. Petugas mengamankan sebanyak 38 orang warga negara (WN) Republik Rakyat Tiongkok (RRT), 3 orang WN Vietnam, 1 orang WN Malaysia, dan 1 orang asal Taiwan.

Dari seluruh WNA yang diperiksa, 20 perempuan bekerja sebagai *lady companion* (LC), yang terdiri atas 17 WN RRT, 2 WN Vietnam, dan 1 WN Malaysia. Mereka menggunakan izin tinggal kunjungan yang tidak diperuntukkan untuk bekerja. Sementara itu, 17 laki-laki WN RRT dengan jenis izin tinggal yang serupa ditemukan bekerja sebagai pekerja konstruksi dan pelayan. Selain itu, 4 orang yang berperan sebagai supervisor dan 2 orang penyalur/koordinator pemandu lagu asing juga menggunakan izin tinggal yang tidak sesuai.

Para WNA tersebut melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yakni penyalahgunaan izin tinggal kunjungan untuk kegiatan bekerja. Sebagai tindak lanjut, Ditjen Imigrasi akan melakukan pemeriksaan mendalam terhadap seluruh WNA terkait izin tinggal dan aktivitas mereka, serta memanggil pihak pengelola tempat hiburan. Bagi WNA yang terbukti melanggar, mereka akan dikenakan tindakan administratif keimigrasian (TAK) berupa deportasi dan penangkalan.

“Kami berkomitmen untuk menegakkan hukum keimigrasian secara konsisten. Penegakan ini bukan hanya untuk menertibkan keberadaan orang asing, melainkan juga memastikan hanya WNA yang patuh hukum dan membawa manfaat yang tinggal serta beraktivitas di Indonesia,” tegas Yuldi. ■

# Satgas Patroli Imigrasi Wilayah Pertambangan dan Industri Periksa 1.698 TKA di NTB

**S**atuan Tugas (Satgas) Patroli Imigrasi Wilayah Pertambangan dan Industri memeriksa 1.698 tenaga kerja asing (TKA) di Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB) pada Selasa (30/9) dan Rabu (1/10). Operasi ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari hasil pengawasan sebelumnya yang dilaksanakan Kantor Imigrasi Sumbawa Besar.

Pemeriksaan keimigrasian tersebut melibatkan tim Operasi Intelijen Keimigrasian, tim Kepatuhan Internal, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Nusa Tenggara Barat, dan Kantor Imigrasi Sumbawa Besar. Tim tiba di lokasi yang terletak di Kecamatan Sekongkang, Kabupaten Sumbawa Barat sekitar pukul 10.30 WITA dan langsung melakukan pengecekan pada area lokasi proyek

(*site project*) perusahaan. Pemeriksaan dilakukan terhadap dokumen perjalanan dan izin tinggal TKA yang bekerja di kawasan tersebut.

“Dari hasil pemeriksaan, ditemukan sejumlah indikasi pelanggaran, di antaranya 64 TKA memiliki alamat tinggal tidak sesuai dengan data di izin tinggal terbatas, 43 TKA bekerja di lokasi berbeda dari yang tercantum dalam rencana penggunaan TKA (RPTKA), serta sejumlah warga negara asing belum melaporkan perubahan alamat maupun mutasi paspor,” ungkap Plt. Direktur Jenderal Imigrasi Yuldi Yusman.

Selain itu, beberapa TKA menggunakan izin tinggal kunjungan (ITK) indeks C22 yang diduga tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberiannya. Bahkan, beberapa perusahaan juga diketahui belum

melaporkan daftar TKA yang dijaminnya. Atas temuan tersebut, Kantor Imigrasi Sumbawa Besar menindaklanjuti dengan pemanggilan klarifikasi terhadap dua perusahaan.

Pembentukan Satgas Patroli Imigrasi di wilayah pertambangan dilakukan sebagai respons terhadap tingginya mobilitas dan potensi pelanggaran keimigrasian oleh TKA di sektor tambang. Pembentukan satgas ini bertujuan memastikan setiap orang asing memiliki izin tinggal dan izin kerja yang sah sesuai peraturan. Kegiatan patroli satgas mencakup pengawasan langsung di area tambang, pemeriksaan dokumen keimigrasian, serta penindakan terhadap pelanggaran. Upaya ini memperkuat pengawasan Imigrasi dan menjaga tertib hukum di kawasan industri strategis. ■

Penulis: Ajeng Rahma Safitri



Satgas Patroli Imigrasi di wilayah pertambangan dan industri (Foto: Dok. Humas Ditjen Imigrasi)

Petugas imigrasi Ngurah Rai mendeportasi JRG, WN Amerika Serikat yang gelar retreat seksualitas di Bali. (Foto: Dok. Kanim Ngurah Rai)



## WN Amerika Dideportasi Usai Gelar Retreat Seksualitas Berbayar

**K**antor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai mendeportasi JRG (44), warga negara (WN) Amerika Serikat (AS), pada Rabu (18/9). JRG dideportasi karena terbukti menyalahgunakan izin tinggal dengan mengadakan kelas retreat seksualitas komersial di wilayah Seminyak, Bali. Kelas tersebut merupakan kelas privat berbayar yang mengajarkan praktik dan teknik seputar hubungan intim, kedekatan emosional, dan aktivitas seksual.

Bermula dari laporan masyarakat yang mencurigai aktivitas JRG, tim Intelijen dan Penindakan Keimigrasian (Inteldakim) Imigrasi Ngurah Rai segera melakukan pengawasan lapangan dan pemantauan siber. Hasilnya, JRG terbukti mengadakan *Intimacy Mastery Retreat* pada 4–8 September di sebuah vila di Seminyak. Tim menemukan foto-foto perlengkapan yang berhubungan dengan kegiatan seksual di lokasi tersebut.

JRG tiba di Bali pada 4 September menggunakan *visa on arrival* (VoA) yang berlaku hingga 4 Oktober. Ia menyalahgunakan izin tinggal dengan mengadakan kegiatan komersial yang tidak sesuai dengan tujuan kunjungannya. Berdasarkan hasil pemeriksaan, JRG diputuskan melanggar Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

JRG diamankan pada 16 September saat hendak melakukan perjalanan ke Jakarta melalui Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali. Atas tindakannya, ia dikenakan tindakan administratif keimigrasian (TAK) berupa deportasi dan penangkalan. Deportasi dilakukan pada 18 September pukul 16.30 WITA dengan menggunakan maskapai EVA Air rute Denpasar–Taipei–Los Angeles. ■

Sumber: Tikim Kantor Imigrasi Ngurah Rai

## WN Tiongkok Diancam Penjara 5 Tahun

**W**arga negara (WN) Tiongkok berinisial DT ditetapkan Direktorat Jenderal Imigrasi sebagai tersangka kasus penyalahgunaan izin tinggal terbatas (ITAS) investor. Tersangka diduga melakukan yang tidak sesuai dengan izin tinggalnya serta melanggar Pasal 122 huruf (a) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Jenderal Imigrasi Yuldi Yusman menjelaskan bahwa DT diamankan di Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara, pada Rabu (20/8). “Proses hukumnya resmi dimulai per 19 September 2025 dengan terbitnya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP),” ujar Yuldi di Jakarta, Selasa (30/9).

Yuldi menerangkan, DT terakhir kali masuk ke Indonesia pada 6 Juli melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Ia menggunakan ITAS investor dengan penjamin PT CGI. Namun, di lapangan, DT melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan izin tinggalnya.

Yuldi menambahkan bahwa tindak pidana keimigrasian DT memiliki ancaman hukuman serius. “Berdasarkan undang-undang, ancaman terhadap pelanggaran ini adalah pidana penjara paling lama lima tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,” papar Yuldi.

Selain itu, sejak 2023, PT CGI dan PT CTC diduga juga digunakan oleh DT untuk menjadi sponsor bagi WNA lainnya agar bisa masuk ke Indonesia. Dengan penetapan sebagai tersangka, DT akan menjalani proses penyidikan atas tindak pidana keimigrasian. ■  
Penulis: Elyan Nadian Zahara

DT ditetapkan Ditjen Imigrasi sebagai tersangka kasus penyalahgunaan ITAS investor. (Foto: Dok. Humas Ditjen Imigrasi)





Kegiatan Sosialisasi Keimigrasian dan Bedah Buku sebagai kolaborasi antara Imigrasi dan Astra International (Foto: Jimmy Asmoro)

# KOLABORASI STRATEGIS PERKUAT LAYANAN IMIGRASI DAN KEPATUHAN DUNIA USAHA

Perkumpulan Analis Keimigrasian (Peranim) dan PT Astra International Tbk berkolaborasi dalam kegiatan sosialisasi pelayanan izin tinggal, pengawasan TKA, hingga bedah buku untuk meningkatkan kepatuhan administrasi perusahaan. Bagaimana sinergi ini berupaya menjawab tantangan operasional dan hukum, serta menjamin iklim investasi yang lebih kondusif?

■ Penulis: Yanos Okterano

**P**erkumpulan Analis Keimigrasian (Peranim) bekerja sama dengan PT Astra International Tbk menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Keimigrasian dan Bedah Buku *Deportasi dalam Hukum Keimigrasian Indonesia*. Kegiatan ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat sinergi antara pemerintah, akademisi, dan sektor swasta. Acara yang berlangsung di Gedung Astra Management Development Institute (AMDI), Tanjung Priok, Jakarta Utara ini diselenggarakan pada Selasa (16/9) serta menjadi forum penting untuk membahas isu-isu krusial seputar regulasi keimigrasian, khususnya yang

menyangkut operasional dunia usaha dan tenaga kerja asing (TKA).

Dibuka secara resmi oleh perwakilan Astra International Gama Anom Yogotomo, acara ini menampilkan dua sesi diskusi panel yang berfokus pada pelayanan izin tinggal serta kebijakan pengawasan dan penindakan keimigrasian. Kedua fokus ini dinilai sangat relevan bagi perusahaan multinasional, seperti Astra, yang memiliki mobilitas tinggi dan interaksi intensif dengan TKA. Diskusi mendalam dilakukan untuk meningkatkan pemahaman dan memastikan kepatuhan administrasi, yang pada akhirnya akan menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif.

## **Kepatuhan sebagai Langkah Strategis**

Sesi pertama diskusi panel menghadirkan Kepala Kantor Imigrasi Karawang Andro Eka Putra sebagai pembicara utama. Ia memaparkan secara terperinci kerangka hukum yang mendasari layanan visa dan izin tinggal, menekankan bahwa kewajiban setiap orang asing untuk memiliki izin tinggal yang sah merupakan elemen fundamental dari kedaulatan negara.

Andro secara spesifik menyoroti peran vital penjamin atau sponsor perusahaan dalam memastikan kepatuhan administrasi TKA. Menurutnya, kepatuhan ini bukan sekadar formalitas, melainkan sebuah langkah strategis yang akan mempermudah Imigrasi dalam melakukan pendataan dan pengawasan.

"Kepatuhan sponsor dan orang asing dalam pengajuan visa sesuai peruntukan sangat penting. Begitu juga dengan pemenuhan administrasi ketenagakerjaan bagi TKA di perusahaan," tegas Andro.

Ia menambahkan, langkah ini sekaligus menjamin kenyamanan bagi



orang asing yang bekerja di Indonesia, yang pada akhirnya akan berkontribusi pada iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Lebih lanjut, Andro menjelaskan berbagai kemudahan yang kini disediakan oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi. Alur layanan izin tinggal kini terintegrasi secara daring, meminimalkan birokrasi dan mempercepat proses. Fasilitas *walk-in* juga disediakan untuk kelompok tertentu, memastikan layanan tetap dapat diakses secara langsung.

Andro juga menyebutkan opsi peralihan izin tinggal melalui *bridging visa* yang dirancang untuk mempermudah administrasi saat terdapat perubahan tujuan tinggal. Dengan berbagai kemudahan tersebut, aktivitas dunia usaha dan ketenagakerjaan diharapkan dapat berjalan tanpa hambatan.

### Pengawasan dan Pencegahan dari Hulu

Pada sesi kedua, Kepala Kantor Imigrasi Bekasi Anggi Wicaksono mengulas tuntas kebijakan pengawasan dan penindakan keimigrasian. Anggi menjelaskan bahwa pengawasan difokuskan pada tiga aspek utama, yaitu keberadaan, kegiatan, dan kepatuhan izin orang asing. Pengawasan ini dilaksanakan dengan prosedur pemeriksaan yang akuntabel.

Dalam hal penegakan hukum, secara proporsional Imigrasi mene-

rapkan dua pendekatan, yaitu *pro justitia* dan tindakan administratif keimigrasian (TAK). Anggi menekankan bahwa disiplin administrasi oleh sponsor dan TKA adalah kunci. Kesesuaian antara jenis visa/izin tinggal dengan jabatan dan lokasi kerja dapat mencegah terjadinya pelanggaran sejak dini, meminimalkan risiko sanksi, serta menciptakan kepastian usaha bagi pelaku industri.

### Bedah Buku: Tinjauan Mendalam atas Isu Deportasi

Sesi bedah buku *Deportasi dalam Hukum Keimigrasian Indonesia* karya Sarno Wijaya menjadi acara puncak. Sesi ini dibuka oleh M. Adnan, Ketua Peranim, yang menyoroti urgensi buku tersebut.

Sarno Wijaya sebagai penulis memaparkan konsep deportasi sebagai bagian dari instrumen administrasi negara untuk menjaga ketertiban dan keamanan. Ia juga menjelaskan secara lugas perbedaan deportasi, penolakan masuk, dan penangkalan.

Diskusi mendalam dalam sesi ini dimoderatori oleh Alif Suaidi serta menghadirkan tiga penanggap ahli yang kompeten di bidang keimigrasian. Ketiga penanggap ahli tersebut adalah Prof. Dr. M. Iman Santoso, Guru Besar Ilmu Hukum Keimigrasian Universitas Krisnadwipayana dan Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi periode 2001–2006; Dr. Ronny F. Sompie, Dirjen Imigrasi periode 2015–2020; dan Yehezkiel Djami, Ketua Tim Deportasi dan Pemulangan, Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian (Ditwasdakim).

Para penanggap menilai bahwa buku ini memberikan kontribusi signifikan bagi literatur keimigrasian

Indonesia yang masih terbatas. Selain mengulas dasar hukum dan praktik, buku ini juga membuka ruang diskusi lanjutan tentang aspek sosial, keamanan, dan HAM dalam deportasi orang asing, termasuk perlindungan hak dasar dan akuntabilitas prosedur oleh petugas.

### Kolaborasi dan Dampak Ekonomi Nasional

Selain memperkuat kerja sama antara asosiasi profesi, akademisi, dan dunia usaha, kegiatan ini juga mengungkap fakta unik yang menunjukkan ikatan kuat antara Imigrasi dan Astra International. Sarno Wijaya yang merupakan mantan Direktur Teknologi Informasi Keimigrasian Ditjen Imigrasi ternyata pernah bekerja di bagian *accounting* PT Astra International. Selain Sarno Wijaya, Direktur Izin Tinggal Keimigrasian Jaya Saputra juga memiliki riwayat karier di Astra.

Acara ini ditutup dengan seruan untuk memperkuat kolaborasi strategis antara semua pihak dalam mengedukasi masyarakat tentang pelayanan dan penegakan hukum keimigrasian. Andro Eka Putra menyampaikan, "Melalui ketaatan penjamin dan orang asing terhadap administrasi ketenagakerjaan serta kesesuaian visa atau izin tinggal, pendataan dan pengawasan keimigrasian akan lebih efektif."

Andro menambahkan, kepatuhan tersebut tidak hanya menjaga kenyamanan dunia usaha dan pekerja asing, tetapi juga mengoptimalkan dampak ekonomi dari investasi asing. Kolaborasi ini diharapkan dapat menciptakan iklim yang kondusif bagi investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional. ■



Sesi tanya jawab pada kegiatan Sosialisasi Keimigrasian dan Bedah Buku (Foto: Jimmy Asmoro)

# DITJEN IMIGRASI RAIH 5 PENGHARGAAN DI AJANG AHI 2025

Keberhasilan Ditjen Imigrasi dan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan meraih penghargaan dalam ajang Anugerah Humas Indonesia 2025 menjadi refleksi dari kerja keras dan dedikasi yang konsisten. Penghargaan ini menjadi pengingat untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dan komunikasi publik.

■ Penulis: Ajeng Rahma Safitri

**D**irektorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan (Kemenimipas) menorehkan prestasi membanggakan dengan meraih lima penghargaan dalam ajang Anugerah Humas Indonesia (AHI) 2025. Pencapaian pada acara yang diselenggarakan oleh Humas Indonesia pada Kamis (25/9) di Surabaya ini menjadi bukti nyata atas kerja keras dan komitmen Imigrasi Indonesia dalam menghadirkan informasi

keimigrasian secara optimal kepada masyarakat.

Selain Ditjen Imigrasi, Kemenimipas juga berhasil memenangkan posisi *Gold Winner* dalam kategori kanal digital Instagram. Koordinator Fungsi Komunikasi Publik Achmad Nur Saleh mengungkapkan rasa syukurnya atas pencapaian ini.

"Kami sangat bersyukur atas pencapaian yang luar biasa ini. Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan yang baru berusia

satu tahun, dibentuk pada Oktober 2024 oleh pemerintahan Presiden Prabowo, sudah berhasil meraih *Gold Winner*. Tak hanya itu, Ditjen Imigrasi juga berhasil meraih beberapa penghargaan. Ini adalah pencapaian yang sangat baik, membuktikan bahwa dedikasi dan kerja cerdas pasti akan membuahkan hasil," ujar Achmad.

Lebih lanjut, Achmad menuturkan bahwa sebagai instansi penjaga pintu gerbang negara, Ditjen Imigrasi secara berkelanjutan melakukan upaya komunikasi dua arah kepada publik dan pemangku kepentingan (*stakeholders*) dengan mengimplementasikan strategi komunikasi yang holistik.

"Tugas kehumasan Ditjen Imigrasi tidaklah mudah. Kami menghadapi tantangan yang beragam, terutama karena audiens kami mencakup seluruh dunia, bukan hanya masyarakat Indonesia. Namun, tim Komunikasi Publik Ditjen Imigrasi telah menunjukkan dedikasi yang luar biasa dan terus berusaha meningkatkan kapasitasnya agar publik makin terlayani dengan optimal dari sisi informasi," jelasnya.

Achmad menambahkan, "Penghargaan ini bukanlah akhir, melainkan pemacu semangat bagi kami untuk terus beradaptasi dan berinovasi dalam setiap strategi komunikasi. Kami berkomitmen untuk memastikan setiap informasi yang kami sampaikan menjangkau luas dan bermanfaat bagi audiens global, demi citra Indonesia yang makin baik di mata dunia."

## Daftar Penghargaan

Berikut ini adalah daftar lengkap penghargaan yang diraih oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan dan Direktorat Jenderal Imigrasi dalam AHI 2025.

### Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan

- Kategori Kanal Digital (Instagram) - *Gold Winner*

### Direktorat Jenderal Imigrasi

- Kategori Kanal Digital (Instagram) - *Gold Winner*
- Kategori Kanal Digital (TikTok) - *Silver Winner*
- Kategori Kanal Digital (Website) - *Bronze Winner*
- Kategori Media Internal - *Silver Winner*
- Program Kehumasan Pemerintah - *Silver Winner* ■

Foto bersama para pemenang penghargaan AHI 2025 di Surabaya (Foto: Dok. Humas Kemenimipas)



# Jawab Tantangan Mobilitas Global, 15 PETUGAS IMIGRASI INDONESIA IKUTI PELATIHAN DI KOREA SELATAN

Untuk menjawab tantangan mobilitas global, Ditjen Imigrasi Indonesia bekerja sama dengan KOICA. Lima belas petugas pilihan mengikuti pelatihan intensif selama 14 hari di Korea Selatan dan memperkuat kemitraan yang terjalin lebih dari satu dekade.

■ Penulis: Muhammad Teuku Khalif Rafi

**D**alam upaya mengimbangi kompleksitas mobilitas manusia global dan ancaman lintas negara, Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Indonesia memperkuat kerja sama strategis dengan Korea International Cooperation Agency (KOICA). Kemitraan yang sudah terjalin erat selama lebih dari satu dekade ini merupakan wujud nyata komitmen bersama dalam meningkatkan profesionalisme dan kualitas layanan perlintasan di Indonesia. Konsistensi program pelatihan sejak 2012 juga menunjukkan keberhasilan kolaborasi Indonesia-Korea dalam menghadapi tantangan yang makin kompleks.

Pada 2025, kerja sama diwujudkan melalui pelatihan intensif bertajuk “Capacity Building for Immigration Management to Combat Foreign Adversary to the National Interest in Indonesia” di Korea Selatan. Pelatihan ini berlangsung selama 14 hari pada 31 Agustus s.d. 13 September 2025 dan diikuti oleh 15 petugas terpilih dari unit pusat Ditjen Imigrasi dan unit pelaksana teknis (UPT) dari berbagai wilayah—termasuk Kantor Imigrasi Padang, Mimika, dan Pontianak.

Rangkaian pelatihan diawali di Pulau Jeju, destinasi wisata kelas dunia yang merupakan pintu gerbang internasional penting bagi Korea. Di sana, peserta tidak hanya mengunjungi Kantor Imigrasi Jeju, tetapi juga mendalami praktik imigrasi investasi serta menyaksikan langsung mekanisme pemeriksaan perlintasan di atas kapal pesiar. Mereka mempelajari praktik canggih keimigrasian, seperti pemeriksaan *autogate* kapal dan sistem i-Pre Checking bagi penumpang yang akan meninggalkan pulau.

Pelatihan kemudian berlanjut di KOICA Academy dan Bandara Internasional Incheon di Kota Seoul.

Dalam pelatihan lanjutan ini, peserta mendapatkan materi dari Imigrasi Incheon tentang penggunaan Korea Immigration Authentication Service (KIAS), teknik identifikasi pemalsuan dokumen canggih, hingga praktik pemeriksaan fitur keamanan paspor dari berbagai negara.

Selanjutnya, fokus pembelajaran bergeser pada pemanfaatan teknologi yang meliputi upaya pencegahan terorisme, pengetatan regulasi visa, serta pemanfaatan teknologi terbaru di Bandara Internasional Incheon. Selain itu, para peserta juga mendalami pengelolaan layanan e-visa dan izin tinggal orang asing, termasuk analisis dan pemanfaatan *big data*

(mahadata) dalam perumusan kebijakan keimigrasian.

Pada acara penutupan, Direktur Kerja Sama Keimigrasian dan Bina Perwakilan Arief Munandar menyampaikan apresiasi atas konsistensi kerja sama yang terjalin baik antara pemerintah Korea melalui KOICA dan Ditjen Imigrasi. “Pengalaman dan ilmu yang diperoleh dari pelatihan ini merupakan bekal berharga untuk diterapkan di unit kerja masing-masing, guna meningkatkan kapasitas SDM, mutu pelayanan, serta menumbuhkan motivasi agar Imigrasi Indonesia dapat terus maju dan sejajar dengan negara lain,” ujar Arief.

Pelatihan ini diharapkan tidak hanya meningkatkan profesionalisme petugas dalam pengawasan, tetapi juga mendorong lahirnya terobosan administrasi berbasis teknologi digital di bidang keimigrasian sebagai respons yang adaptif terhadap tantangan zaman yang makin kompleks. ■

Peserta pelatihan dari Imigrasi Indonesia di Korea Selatan (Foto: Dok. Direktorat Kerja Sama Keimigrasian dan Bina Perwakilan)



# Ngopi Pimpasa: **EDUKASI TENTANG TPPO DAN PEKERJA LEGAL OLEH IMIGRASI SOEKARNO-HATTA**

Lewat kegiatan Ngopi Pimpasa, Imigrasi Soekarno-Hatta mengedukasi masyarakat tentang TPPO dan mendengar keluhan warga soal WNA. Imigrasi Soekarno-Hatta berkomitmen untuk terus mengoptimalkan peran pimpasa di setiap kelurahan.

■ Penulis: Samuel Arisandi

**K**antor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Soekarno-Hatta menggelar edukasi pencegahan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan pekerja migran Indonesia (PMI) nonprosedural di Kelurahan Cengkareng Timur, Jakarta Barat pada Senin (22/9) dan Selasa (23/9). Melalui kegiatan bertajuk Ngopi Pimpasa (Ngopi Pintar Bersama Petugas Imigrasi Pembina Desa), Imigrasi Soekarno-Hatta menysasar warga RW 17 dan RW 19.

Kegiatan dipimpin oleh Kepala Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian (Inteldakim) Eko Yudis Parlin Rajagukguk, juga turut dihadiri oleh Tim Intelijen Kantor Wilayah Direktorat (Ditjen) Imigrasi DKI Jakarta serta pengurus lingkungan setempat, termasuk pengelola Rusunami City Park dan Rusun Cinta Kasih Tzu Chi.

Dalam forum dialog tersebut, tim pimpasa Imigrasi Soekarno-Hatta

menekankan bahaya perekrutan tenaga kerja ilegal ke luar negeri dan risiko hukum yang mengancam warga jika tidak mengikuti prosedur resmi. Warga diimbau untuk aktif melapor jika menemukan indikasi praktik TPPO di lingkungannya.

Kepala Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta Galih P. Kartika Perdhana menyatakan bahwa pimpasa merupakan upaya Imigrasi untuk mendampingi warga. "Pimpasa hadir untuk mendampingi warga, memberikan pemahaman tentang bahaya perdagangan orang dan pekerja migran nonprosedural, sekaligus memastikan pengawasan orang asing berjalan efektif melalui komunikasi dua arah dengan masyarakat," ujar Galih.

Ia menegaskan, laporan masyarakat menjadi informasi awal yang berharga. Informasi terkait dugaan TPPO, PMI nonprosedural, atau pelanggaran



Koordinator Fungsi Kerja Sama Izin Tinggal Keimigrasian Iman Syafrizal menjawab pertanyaan warga pada kegiatan Ngopi Pimpasa. (Foto: Dok. Kanim Soekarno-Hatta)

keimigrasian oleh orang asing dapat disampaikan kepada pimpasa disertai bukti awal untuk diverifikasi lebih lanjut.

Selain isu TPPO, warga juga memanfaatkan forum tersebut untuk menyampaikan keluhan mengenai keberadaan orang asing di permukiman mereka. Beberapa masalah yang mengemuka, antara lain, kesulitan pengurus lingkungan dalam memperoleh data warga negara asing (WNA) dari pengelola hunian, dugaan ketidaksesuaian alamat domisili pada dokumen izin tinggal terbatas (ITAS), hingga perilaku orang asing yang dianggap mengganggu ketertiban.

Menanggapi hal ini, Imigrasi memberikan penjelasan mengenai tata cara penyampaian laporan dugaan pelanggaran orang asing. Pihak Imigrasi juga mengapresiasi dukungan dan kesiapan pengurus lingkungan untuk memberikan akses kepada petugas pimpasa dalam melaksanakan pemeriksaan dan pengawasan di kawasan Rusunami City Park dan Rusun Cinta Kasih Tzu Chi.

Penguatan sinergi ini sejalan dengan prinsip *selective policy* Imigrasi, yaitu pemberian izin tinggal bagi orang asing dilakukan secara ketat dan selektif untuk kepentingan nasional serta perlindungan masyarakat. Imigrasi Soekarno-Hatta berkomitmen untuk terus mengoptimalkan peran pimpasa di setiap kelurahan guna menjaga ketertiban lingkungan dan melindungi warga dari ancaman TPPO serta bekerja secara ilegal. ■



Ketua RT 11 Kelurahan Cengkareng Timur menyampaikan aspirasi dalam kegiatan Ngopi Pimpasa. (Foto: Alfiqri Anshari)

# Lomba Esai Nasional Imigrasi Jambi dan UNAJA: GENERASI MUDA SALURKAN GAGASAN KRITIS DAN KONSTRUKTIF

Generasi muda menunjukkan pemikiran kritis tentang peran strategis keimigrasian melalui lomba menulis esai nasional. Kolaborasi antara akademisi dan institusi keimigrasian ini menggaungkan pentingnya peran imigrasi pada era reformasi.

■ Penulis: Dapot Silalahi, Yolanda R.J.

Fakultas Hukum Universitas Adiwangsa Jambi (UNAJA) melalui Himpunan Mahasiswa Hukum (HIMAKUM) berkolaborasi dengan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jambi sukses menyelenggarakan Lomba Esai Nasional Tingkat SMA/SMK/MA Sederajat Tahun 2025. Kegiatan yang mengusung tema “27 Tahun Reformasi Indonesia dalam Layanan Keimigrasian: Menjaga Pintu Gerbang Negara” ini menjadi wadah bagi generasi muda untuk menyalurkan gagasan kritis dan konstruktif mengenai peran strategis keimigrasian pada era reformasi.

## Mataram Raih Juara 1

Setelah melalui seleksi ketat sejak pendaftaran dibuka pada Juni 2025, panitia mengumumkan lima finalis terbaik pada 18 Juli 2025. Kelima finalis tersebut berasal dari berbagai daerah, yaitu Ni Made Berliana Karunia Artha (SMA Trimurti Surabaya), Veline Angel Lee (SMA Yos Sudarso Batam), Chelsy Aprillita (SMA Negeri 2 Sekayu), Alisha Rizki Maulida (SMA Negeri 3 Mataram), dan Amanda Gabriela Chrislayanto (SMK Giovanni Kupang).

Kelima finalis berkompetisi memperebutkan gelar juara melalui babak presentasi akhir yang digelar pada Jumat (12/9). Presentasi tersebut diselenggarakan di hadapan dewan juri yang terdiri atas perwakilan Kantor Imigrasi Jambi dan akademisi Fakultas Hukum UNAJA.

Setelah persaingan yang sengit, Alisha Rizki Maulida dari SMA Negeri 3 Mataram berhasil meraih posisi juara pertama. Esainya mengangkat topik “Inovasi Bukan Soal Canggihnya Teknologi, tapi tentang Bagaimana Negara Hadir dengan Lebih Dekat dan Lebih Cepat”. Posisi juara kedua dan ketiga masing-masing diraih oleh Amanda Gabriella Chrislayanto dan Chelsy Aprillita.

## Sinergi Akademisi dan Institusi

Dekan Fakultas Hukum UNAJA Dr. Muhammad Al-Haadi Nugraha menekankan bahwa lomba esai ini menjadi momentum penting untuk menumbuhkan kesadaran cinta tanah air dan semangat bela negara di kalangan generasi muda pada era Society 5.0.

Penilaian karya peserta oleh dewan juri (Foto: Dok. Kanim Jambi)



“Lomba esai ini menjadi wadah pemikiran bagi pelajar SMA di seluruh Indonesia. Saya mengucapkan terima kasih kepada Ketua HIMAKUM dan seluruh panitia, serta jajaran Imigrasi Jambi atas dukungan penuhnya,” ungkap Haadi.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Jambi Wahyu Hidayat menyambut baik sinergi ini. Ia menilai kegiatan tersebut merupakan langkah positif untuk memperkuat pemahaman pelajar mengenai peran keimigrasian.

“Lomba esai ini menjadi ruang pembelajaran dan pembentukan karakter. Melalui tulisan, para pelajar dapat menyalurkan gagasan yang konstruktif untuk mendukung layanan keimigrasian yang makin baik pada era reformasi,” ujar Wahyu.

Senada dengan itu, Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jambi Hubertus Henc Marbun menegaskan komitmen lembaganya dalam mendukung penuh kegiatan tersebut.

“Imigrasi bukan semata pelayanan publik, melainkan juga sebagai penjaga kedaulatan negara. Melalui lomba esai ini, kami ingin mengajak generasi muda untuk lebih memahami fungsi strategis Imigrasi sekaligus menanamkan rasa cinta tanah air,” tutur Hubertus.

Kolaborasi antara Fakultas Hukum UNAJA, HIMAKUM, dan institusi keimigrasian ini diharapkan dapat melahirkan karya akademik berkualitas serta mendorong generasi muda untuk berpikir kritis dan kreatif serta menumbuhkan rasa nasionalisme dalam menghadapi tantangan globalisasi. ■

Paparan salah satu finalis lomba menulis esai (Foto: Dok. Kanim Jambi)



Ketua Tim Pansel Calon Dirjen Imigrasi mengumumkan tiga nama calon dirjen imigrasi. Proses seleksi disebutkan berlangsung secara ketat, berbasis merit, terbuka, dan kompetitif.

■ Penulis: Yolanda Rosylvia Juniar

**K**etua Panitia Seleksi (Pansel) Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Madya Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan Silmy Karim mengumumkan tiga nama calon direktur jenderal (dirjen) imigrasi hasil seleksi akhir. Ketiga nama tersebut adalah Yuldi Yusman, Ibnu Ismoyo, dan Ahmad Purbaja.

Pengumuman hasil seleksi tertuang dalam Pengumuman Tim Panitia Seleksi Nomor PANSEL JPT/09/2025-11 pada 12 September 2025 yang mencakup posisi dirjen imigrasi. Proses seleksi terbuka ini merupakan tindak lanjut dari Surat Menteri Sekretaris Negara Nomor B-1/Seskab/D-6/04/2025 tanggal 23 April 2025 tentang Pembentukan Panitia Seleksi Terbuka Pengisian JPT Utama dan JPT Madya di Kementerian/Provinsi/Lembaga serta Surat Menteri Sekretaris Negara Nomor R-230/M/SDK/PA.01.03/07/2025 tanggal 3 Juli 2025 tentang Pengisian JPT Madya di Lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan.

Tim Pansel Calon Dirjen Imigrasi diketuai oleh Wakil Menteri (Wamen) Imigrasi dan Pemasarakatan

Kementerian Sekretariat Negara (Kemensekretg) Purnomo Sucipto; Deputi Bidang Pelayanan Publik di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Otok Kuswandar; Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal pada Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (Kemeninvesthil/BKPM) Riyatno; serta akademisi Harkristuti Harkrisnowo.

Silmy Karim menyatakan, "Proses seleksi ini didasarkan pada asas transparansi, dilaksanakan secara ketat, berbasis merit, terbuka, dan kompetitif untuk menjaring figur pimpinan yang memiliki integritas, kompetensi, dan rekam jejak yang baik."

Seleksi dilaksanakan selama dua bulan, mulai dari 22 Juli hingga 23 September. Tahapannya meliputi seleksi administrasi, uji kompetensi teknis, uji kompetensi manajerial dan sosial kultural, wawancara, tes kesehatan, serta penilaian rekam jejak.

"Tiga orang terpilih tersebut adalah peserta dengan akumulasi nilai tertinggi yang dinilai pada setiap tahapan

Seleksi Transparan, Ketat, dan Kompetitif:

# SILMY KARIM UMUMKAN 3 NAMA CALON DIRJEN IMIGRASI

(Imipas) Silmy Karim. Sementara itu, anggota pansel terdiri atas Sekretaris Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan (Kemenimipas) Asep Kurnia; Inspektur Jenderal Kemenimipas Yan Sultra Indrajaya; Deputi Bidang Politik, Hukum, Keamanan, dan Hak Asasi Manusia di Sekretariat Kabinet

seleksi. Jadi, memang yang lolos adalah kandidat-kandidat terbaik," ujar Silmy.

Jabatan dirjen imigrasi memiliki posisi sangat strategis dan krusial bagi negara. Pentingnya posisi ini juga tecermin dari sejarahnya. Tokoh nasional berintegritas tinggi, seperti mantan Kapolri Jenderal Polisi (Purn.)

Hoegeng Iman Santoso, pernah menjabat sebagai dirjen imigrasi dalam perjalanan kariernya. Oleh karena itu, panitia seleksi memastikan penjaringan dan seleksi dilakukan secara terbuka dan transparan.

Imigrasi berperan dalam mengatur dan mengawasi perlintasan orang





Wamen Kemenimipas Silmy Karim saat memimpin rapat Tim Panitia Seleksi Direktur Jenderal Imigrasi (Foto: Adi Prasetyo)

**“SELEKSI DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI ADALAH BAGIAN DARI UPAYA KAMI DALAM MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL, TRANSPARAN, DAN AKUNTABEL.”**

masuk dan keluar wilayah Indonesia. Volume pelintas terus menunjukkan tren peningkatan signifikan selama beberapa tahun terakhir. Tercatat sebanyak 19.439.983 orang masuk dan keluar Indonesia pada 2022, sebanyak 41.666.999 pada 2023, dan sebanyak 46 juta pada 2024. Sementara itu, pada 2025 dalam periode 1 Januari hingga 30 September terdapat 39,5 juta perlintasan. Jika dikomparasikan dengan tahun sebelumnya pada periode yang sama (35,6 juta perlintasan), jumlah

perlintasan Indonesia di 2025 sampai triwulan ketiga meningkat sebanyak 10,79%.

Imigrasi juga menjadi instansi penghasil penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dengan rekam jejak (*track record*) meningkat dari tahun ke tahun. Pada 2021, total PNBP Imigrasi sebesar Rp1,4 triliun; tahun 2022 sebesar Rp4,6 triliun; tahun 2023 sebesar Rp7,6 triliun; dan tahun 2024 sebesar Rp9 triliun. Sementara itu, selama periode 1 Januari hingga 30 September

2025, PNBP Ditjen Imigrasi mencapai Rp7,7 triliun. Jika dibandingkan 2024 untuk periode yang sama, terdapat kenaikan sebesar Rp1,17 triliun atau sekitar 17,8%.

“Seleksi direktur jenderal imigrasi adalah bagian dari upaya kami dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, dan akuntabel. Kami berharap pimpinan yang terpilih nantinya dapat membawa Ditjen Imigrasi makin baik sehingga pengawasan orang asing dan pelayanan publik menjadi optimal,” papar Silmy.

Selanjutnya, ketiga nama calon dirjen imigrasi akan disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia. Pengumuman hasil ini secara terbuka dapat diakses melalui tautan [pansel.kemenimipas.go.id/pengumuman](https://kemenimipas.go.id/pengumuman). ■

**S**eiring dengan diimplementasikannya platform All Indonesia di sejumlah bandara dan pelabuhan internasional, banyak masyarakat bertanya, "Apa yang harus dilakukan apabila terjadi kesalahan pengisian data pada formulir deklarasi kedatangan di All Indonesia?" Salah satunya adalah kesalahan penulisan tanggal kedatangan pada formulir terkirim (*submitted*).

Untuk saat ini, solusinya adalah mengisi ulang formulir deklarasi kedatangan. Proses ini tidak dikenakan biaya apa pun serta dapat dilakukan sebelum kedatangan, baik oleh penumpang perorangan maupun grup. Dengan langkah ini, masyarakat dapat melanjutkan perjalanan dengan aman tanpa harus khawatir jika terdapat kekeliruan pada data sebelumnya.

### Mengenal All Indonesia

All Indonesia adalah inovasi digital dari Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi bersama kementerian/lembaga terkait. Platform yang tersedia dalam versi situs web (*web-based*) maupun aplikasi seluler (*mobile app*) ini berfungsi untuk menyatukan seluruh kebutuhan deklarasi penumpang internasional—mulai dari imigrasi, bea dan cukai, kesehatan, hingga karantina—ke dalam satu formulir digital.

Masyarakat dapat mengisi formulir di aplikasi sejak tiga hari sebelum tanggal kedatangan di Indonesia. Fitur ini membantu masyarakat menghindari antrean panjang di area kedatangan internasional. Saat ini, All Indonesia telah digunakan di sejumlah bandara dan pelabuhan utama, serta secara bertahap diperluas ke titik kedatangan lain di seluruh Indonesia.

### Fitur Pembaruan Data Segera Hadir

Koordinator Fungsi Komunikasi Publik Achmad Nur Saleh menegaskan bahwa Ditjen Imigrasi terus melakukan pemantauan dan evaluasi untuk meningkatkan pengalaman pengguna All Indonesia.

"Pada beberapa minggu awal implementasi All Indonesia, Direktorat Jenderal Imigrasi secara intensif melakukan pemantauan dan evaluasi untuk peningkatan pengalaman pengguna. Segera hadir fitur untuk meng-*update* data yang salah input meskipun formulir sudah terkirim sehingga penumpang internasional bisa merasa lebih nyaman," ujar Achmad.



Pelintas salah mengisi data di aplikasi All Indonesia (ilustrasi). (Foto: Arif Rahman Suryaman)

# Salah Input Data di Platform All Indonesia? **INI SOLUSINYA**

Kesalahan pengisian data pada platform All Indonesia menjadi salah satu sorotan Direktorat Jenderal Imigrasi. Fitur pembaruan segera dihadirkan.

■ Penulis: Ajeng Rahma Safitri

Hadirnya All Indonesia bukan sekadar mempermudah proses administratif kedatangan. Transformasi digital ini juga menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk memberikan pelayanan publik yang modern, cepat, dan efisien. Dengan sistem

terintegrasi, Indonesia ingin memastikan pengalaman pertama para pelaku perjalanan internasional, baik wisatawan maupun pelaku bisnis, berlangsung lancar dan menyenangkan. ■

# KETAHUI ATURAN KHUSUS TENTANG PASPOR BAGI ANAK BERKEWARGANEGARAAN GANDA

Bagi anak dengan dua kewarganegaraan, paspor Indonesia mereka bergantung pada satu pilihan krusial. Sebelum usia 21 tahun, mereka harus memutuskan untuk menjadi WNI atau WNA.

■ Penulis: Ajeng Rahma Safitri

**T**idak semua anak yang berusia 17 tahun ke atas otomatis berhak atas paspor Indonesia dengan masa berlaku lima hingga sepuluh tahun. Bagi anak berkewarganegaraan ganda, ada aturan khusus yang membuat paspor mereka hanya bisa berlaku terbatas.

“Dalam ketentuan paspor Republik Indonesia (RI), subjek anak berkewarganegaraan ganda tidak boleh melebihi batas usianya untuk menyatakan memilih kewarganegaraan,”

ungkap Koordinator Fungsi Komunikasi Publik Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Achmad Nur Saleh.

Ketentuan mengenai kewajiban anak berkewarganegaraan ganda untuk menentukan statusnya diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Dalam Pasal 6 ayat (1) dijelaskan bahwa anak yang memiliki kewarganegaraan ganda, misalnya karena lahir dari perkawinan campuran antara warga negara

Indonesia (WNI) dan warga negara asing (WNA), wajib menyatakan pilihan kewarganegaraannya setelah berusia 18 tahun atau ketika sudah menikah. Lebih lanjut, Pasal 6 ayat (3) menegaskan adanya tenggat waktu yang jelas, yaitu pernyataan memilih kewarganegaraan wajib disampaikan paling lambat tiga tahun setelah anak mencapai usia 18 tahun atau setelah menikah.

Achmad mencontohkan, seorang anak berkewarganegaraan ganda berusia 18 tahun mengajukan permohonan penggantian paspor RI. Karena anak tersebut belum memilih kewarganegaraan dan batas waktunya adalah hingga usia 21 tahun, masa berlaku paspor yang bisa diberikan maksimal tiga tahun. Dengan demikian, paspor akan habis masa berlaku persis saat anak berusia 21 tahun, tidak berlaku lima atau sepuluh tahun.

Untuk mengajukan paspor RI bagi anak berkewarganegaraan ganda, terdapat sejumlah persyaratan khusus yang harus dipenuhi. Orang tua wajib terlebih dahulu melakukan pendaftaran status anak berkewarganegaraan ganda terbatas sebelum anak berusia 18 tahun. Setelah itu, saat mengajukan permohonan paspor, orang tua diminta melampirkan berbagai dokumen penting, di antaranya e-KTP orang tua WNI, kartu keluarga, akta kelahiran anak, serta akta perkawinan atau buku nikah orang tua. Jika salah satu orang tua berstatus WNA, pemohon juga harus melampirkan izin tinggal keimigrasian yang masih berlaku dan fotokopi paspor milik orang tua tersebut.

Achmad mengingatkan orang tua dan anak berkewarganegaraan ganda untuk proaktif memahami kewajiban memilih kewarganegaraan. Kewajiban ini harus dilaksanakan sebelum batas waktu yang ditentukan.

“Dengan begitu, anak tidak akan mengalami masalah dalam dokumen keimigrasian maupun administratif, misalnya paspor yang masa berlakunya terpotong atau terbatas. Setiap negara punya asas yang berbeda dalam hal kewarganegaraan. Jadi, ini hal yang sangat penting untuk menjadi perhatian orang tua dan anak,” pungkasnya. ■

Kewarganegaraan ganda (ilustrasi) (Sumber: expattaxes.com.au)



## Dilema Kebijakan Publik: **ANTARA KEBIJAKAN POPULIS DAN KEBIJAKAN BERBASIS DATA**

Di tengah gejolak aksi massa, muncul dilema pemerintah: memilih kebijakan populis atau berbasis data? Keduanya bagai dua sisi mata uang yang sama-sama memiliki konsekuensi serius.

■ Penulis: Rendy Firnanda

**D**alam beberapa pekan terakhir, demonstrasi besar-besaran terjadi tidak hanya di Indonesia, tetapi juga berbagai belahan dunia. Di Nepal, aksi unjuk rasa menewaskan setidaknya 72 orang dan menyebabkan 191 lainnya menjalani perawatan. Tidak berhenti di situ, aksi massa juga disertai dengan penjarahan dan pembakaran gedung-gedung pemerintahan serta rumah para pejabat yang dianggap sebagai pemicu kemarahan publik. Fenomena serupa juga terjadi di sejumlah negara lain, seperti Malaysia, Filipina, hingga negara-negara Eropa, yaitu Prancis, Spanyol, dan Inggris.

Gelombang demonstrasi ini merupakan imbas dari kebijakan pemerintah ditambah perilaku sebagian pejabat yang memicu kegeraman

publik. Di Indonesia, misalnya, aksi massa dipicu oleh sejumlah kebijakan kontroversial. Kebijakan tersebut mulai dari kenaikan pajak hingga 250 persen di Kabupaten Pati, kenaikan tunjangan jabatan anggota DPR RI, hingga respons tidak profesional dari para wakil rakyat yang memperparah dan memicu kemarahan masyarakat.

Situasi ini menimbulkan pertanyaan: Apakah kebijakan yang diambil pemerintah benar-benar keliru atau sekadar kurang populer sehingga dianggap merugikan masyarakat?

### **Kebijakan Populis di Indonesia**

Istilah *populisme* sering muncul dalam konteks ketidakpuasan terhadap status quo, yaitu ketika para populis berusaha memobilisasi dukungan rakyat dengan retorika yang sederhana dan

langsung. Kebijakan populis biasanya bersifat jangka pendek, prorakyat, serta ditujukan untuk mengambil hati masyarakat, misalnya melalui pemberian subsidi, tunjangan pensiun, atau fasilitas gratis. Namun, di balik itu, stabilitas ekonomi dan kepentingan jangka panjang sering kali diabaikan.

Sejumlah presiden Indonesia dikenal menerapkan kebijakan populis. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, misalnya, meluncurkan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan menggratiskan biaya pendidikan SD serta SMP melalui program Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Begitu pula Presiden Joko Widodo yang memiliki program populis, seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS), pembangunan infrastruktur berskala besar, serta program dana desa. Kebijakan-kebijakan populis ini turut berkontribusi pada popularitas mereka.

Kini, pada era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, sejumlah kebijakan serupa juga diperkenalkan, antara lain, penghapusan utang macet UMKM,



## BERANGKAT DARI SITUASI TERSEBUT, KEBIJAKAN BERBASIS DATA HADIR SEBAGAI ALTERNATIF YANG LEBIH RASIONAL.

diskon tarif listrik 50 persen, hingga program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi kelompok rentan dengan target 15 juta penerima manfaat.

### Bagai Pedang Bermata Dua

Kebijakan populis sering kali menjadi pedang bermata dua. Di satu sisi, kebijakan ini cepat mendapat sambutan positif karena langsung menyentuh kebutuhan dasar, seperti subsidi harga, bantuan langsung tunai, atau penghapusan utang. Masyarakat merasa aspirasi mereka didengar sehingga legitimasi pemerintah menguat. Namun, di sisi lain, kebijakan populis menyimpan konsekuensi serius.

Beban fiskal menjadi risiko terbesar karena subsidi atau bantuan besar-besaran dapat menguras anggaran negara jika tidak dikalkulasikan secara cermat. Selain itu, kebijakan ini cenderung bersifat jangka pendek karena hanya memberikan manfaat sesaat tanpa menyelesaikan akar masalah, seperti kurangnya lapangan kerja dan rendahnya produktivitas. Lebih lanjut, distorsi kebijakan dapat terjadi, misalnya subsidi BBM yang ironisnya justru lebih banyak dinikmati

kelompok menengah daripada kelompok rentan dan miskin.

Berangkat dari situasi tersebut, kebijakan berbasis data hadir sebagai alternatif yang lebih rasional. Kebijakan ini tidak semata-mata merespons tekanan publik, tetapi dirumuskan melalui analisis mendalam terhadap kondisi nyata di lapangan. Dengan begitu, keputusan yang diambil mampu menjawab akar permasalahan dan memberikan dampak jangka panjang.

Secara sederhana, kebijakan berbasis data dapat dipahami sebagai pendekatan pengambilan keputusan yang berlandaskan pada data yang akurat dan relevan. Tujuannya adalah mengoptimalkan sumber daya sekaligus menghadirkan manfaat yang tepat sasaran. Penerapannya melibatkan proses pengumpulan, pengolahan, dan analisis data untuk merumuskan kebijakan yang efektif dan efisien. Dengan kata lain, kebijakan ini tidak hanya menekankan aspek popularitas, tetapi juga bertumpu pada kajian empiris yang berorientasi pada solusi berkelanjutan.

Namun, kenyataannya tidak semua kebijakan berbasis data berjalan mulus.

Contoh klasik adalah kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi. Berdasarkan data, mayoritas subsidi BBM justru dinikmati kelompok menengah-atas dibandingkan masyarakat rentan. Pemerintah lalu menyesuaikan tarif agar subsidi lebih tepat sasaran. Meski logis, kebijakan ini tetap menuai protes besar-besaran karena langsung menyentuh kebutuhan dasar sehari-hari.

Hal serupa terjadi dalam bidang keimigrasian. Kebijakan bebas visa kunjungan (BVK) bagi 169 negara dirancang berdasarkan data tren kunjungan wisatawan mancanegara yang diyakini dapat meningkatkan devisa. Akan tetapi, sebagian masyarakat menolak kebijakan ini karena khawatir terhadap meningkatnya kriminalitas yang dilakukan oleh warga negara asing (WNA), penyalahgunaan narkoba, hingga masuknya tenaga kerja asing (TKA) ilegal ke Indonesia.

### Strategi Komunikasi yang Melengkapi

Kedua contoh tersebut menunjukkan bahwa sebuah kebijakan, meskipun berbasis data, tetap berpotensi menuai resistansi jika tidak diiringi dengan komunikasi publik yang baik dan mitigasi dampak sosial. Oleh karena itu, pemerintah tidak hanya perlu merumuskan kebijakan berdasarkan data, tetapi juga memastikan adanya strategi komunikasi yang efektif agar masyarakat memahami latar belakang, tujuan, dan manfaatnya. Tanpa komunikasi yang baik, kebijakan berbasis data sekalipun dapat ditolak karena dianggap memberatkan. Pelibatan masyarakat sejak tahap perumusan hingga evaluasi juga perlu ditingkatkan agar kebijakan tidak hanya tepat sasaran secara teknis, tetapi juga memperoleh legitimasi sosial.

Pada akhirnya, kebijakan populis tidak dapat dihindari sepenuhnya karena menjadi sarana pemerintah untuk menunjukkan keberpihakan kepada masyarakat. Akan tetapi, populisme tanpa pijakan data hanya akan melahirkan solusi instan yang tidak berkelanjutan. Sebaliknya, jika kebijakan populis disinergikan dengan data, setiap keputusan tidak hanya mampu menyentuh hati masyarakat, tetapi juga memperkuat fondasi pembangunan jangka panjang. Perpaduan antara kedekatan emosional dan ketepatan rasional inilah yang akan menjadikan suatu kebijakan benar-benar hadir sebagai solusi, bukan sekadar janji. ■

Dari Hati Sampai ke Hati:

# KOMUNIKASI PUBLIK YANG BEREMPATI

Di tengah perjuangan rakyat menghadapi krisis, pernyataan publik yang kurang sensitif justru berpotensi menyulut reaksi massa. Ketegangan sosial semacam ini dapat dihindari melalui pendekatan komunikasi yang tepat dan berempati.

■ Penulis: Shinta Puruhita

Tahun 2025 menjadi babak yang menantang bagi masyarakat Indonesia. Saat jutaan warga berjuang menghadapi tekanan ekonomi, gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK), dan tingginya angka pengangguran, muncul sebuah ironi yang menyakitkan. Bukannya mendapatkan dukungan, perjuangan masyarakat justru dihadapkan pada kesan minimnya empati dari sebagian pejabat publik dan pemerintah dalam merespons situasi.

Kebijakan pemerintah yang dinilai kontroversial dan tidak sensitif terhadap kondisi mayoritas rakyat menambah berat beban tersebut. Ketidakpuasan publik memuncak ketika kebijakan pemberian tunjangan baru bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI ditetapkan. Di tengah krisis ekonomi yang masih terasa, keputusan ini dianggap menempatkan kepentingan elite di atas penderitaan jutaan masyarakat.

Kekecewaan publik makin mendalam seiring munculnya respons dari beberapa pejabat dan wakil rakyat. Pernyataan dan sikap mereka dalam menanggapi situasi dianggap gagal mencerminkan empati terhadap kesulitan yang dialami warga. Hal ini menciptakan jarak emosional yang signifikan antara representasi negara dan masyarakat yang diwakilinya.

Puncak dari ketegangan sosial ini terwujud dalam demonstrasi besar-besaran di berbagai kota besar pada akhir Agustus lalu. Aksi massa yang awalnya bertujuan damai dengan cepat memanas, bahkan berujung pada kerusuhan yang disayangkan. Tragedi ini, yang menelan korban dan merembet hingga penjarahan kediaman beberapa pejabat, menjadi penanda

serius akan kegagalan mendasar pada pola komunikasi publik. Di tengah kompleksnya masalah rakyat, narasi dari kalangan elite justru terasa kontraproduktif, menyulut gejolak sosial, dan menegaskan dampak fatal dari komunikasi yang tidak efektif dan minim empati.

## Komunikasi dari Hati

Menyikapi eskalasi konflik sosial, para praktisi komunikasi menekankan pentingnya perubahan pendekatan. *Founder dan Principal Consultant NAGARU Communication Dian Agustine Nuriman* menyarankan pemerintah—khususnya melalui para praktisi humas pemerintah (*government public relations*)—untuk menyusun narasi dengan menerapkan pendekatan komunikasi hati.

Konsep ini dicetuskan oleh Guru Besar Ilmu Komunikasi UPN Veteran Yogyakarta Prof. Puji Lestari. Konsep tersebut berfokus pada dua aspek krusial, yaitu olah pikir—mengarahkan pikiran pada hal positif untuk membentuk sikap konstruktif—dan olah rasa—memunculkan simpati dan empati. Tujuannya sederhana tetapi mendalam, yakni mencapai komunikasi yang efektif dan harmonis serta mengurangi risiko sosial.

Secara filosofis, komunikasi hati berakar dari gagasan *nonviolent communication* (NVC) atau komunikasi tanpa kekerasan yang dicetuskan oleh psikolog klinis Marshall Rosenberg. Konsep NVC berfokus pada komunikasi tanpa kekerasan dengan tujuan membangun pemahaman dan empati dalam percakapan alih-alih konfrontasi. Secara ideal, jika keefektifan dan keharmonisan komunikasi ini tercapai, potensi

munculnya konflik dapat dihindari.

Oleh karena itu, komunikasi hati merupakan kebutuhan mendesak bagi pemerintah dalam berinteraksi dengan rakyat. Pada dasarnya, rakyat tidak menginginkan konfrontasi saat menyuarakan pendapat. Hal yang mereka butuhkan adalah keluhannya didengarkan, perasaannya divalidasi, dan kebutuhannya dipahami. Cara untuk mencapai hal tersebut adalah dengan menghadirkan “hati” dalam setiap komunikasi, yang terwujud dalam bentuk empati—sebuah kemampuan interpersonal esensial yang selayaknya dimiliki setiap pejabat publik.

## Konsep *Begin with the End in Mind*

Lantas, bagaimanakah cara menghadirkan empati dalam komunikasi? *Pertama*, terapkan konsep *begin with the end in mind*. Konsep dari buku *The 7 Habits of Highly Effective People* karya Stephen R. Covey ini menekankan pentingnya memulai segala hal dengan gambaran akhir yang jelas. Dengan demikian, jalan untuk mencapai tujuan menjadi terpandu.

Biasakanlah untuk membayangkan dan menetapkan tujuan yang jelas sebelum bertindak. Setiap sikap dan tindakan harus dimulai dari pertimbangan matang dalam pikiran. Cara ini menjamin bahwa setiap tindakan yang diambil terarah dan tidak sembrono.

*Kedua*, biasakan diri untuk menerapkan *empathic listening and response*. *Empathic listening* adalah kemampuan mendengarkan yang melampaui sekadar kata-kata, dengan secara sadar berupaya memahami emosi, sudut pandang, serta kebutuhan lawan bicara. Praktik ini berarti melibatkan hati dan pikiran secara

penuh selama proses mendengar. Dalam komunikasi publik, kemampuan ini sangat penting bagi komunikator, seperti pejabat publik atau pemimpin organisasi, untuk memitigasi potensi konflik.

*Empathic listening* berperan sebagai input, sedangkan *empathic response* merupakan *output*-nya. Respons empati hanya akan muncul jika proses *empathic listening* telah terpenuhi. *Empathic response* mencakup dua kebutuhan dasar yang harus divalidasi oleh komunikator publik: kebutuhan logis (*logical needs*), yaitu pemahaman terhadap fakta, data, dan alasan rasional dari audiens, dan kebutuhan emosional (*feeling*

*needs*) yang merujuk pada pemahaman terhadap perasaan, nilai, dan dampak psikologis dari suatu isu.

Jika pejabat publik dan pemerintah berhasil menerapkan *empathic listening* dalam pola komunikasi mereka, seharusnya mereka mampu memvalidasi perasaan rakyat terlebih dahulu sebelum mendata kebutuhan logis guna menentukan solusi yang tepat.

Secara keseluruhan, komunikasi hati merupakan instrumen esensial bagi pejabat publik dan pemerintah. Kegagalan dalam berkomunikasi di muka umum dapat disamakan dengan kegagalan berinteraksi dengan rakyat, yang berpotensi memicu gejolak sosial.

**SECARA IDEAL, JIKA KEEFEKTIFAN DAN KEHARMONISAN KOMUNIKASI INI TERCAPAI, POTENSI MUNCULNYA KONFLIK DAPAT DIHINDARI.**

Dengan menguasai komunikasi hati dan memahami pentingnya menempatkan empati pada situasi yang tepat, diharapkan para pejabat publik dan pemerintah tidak lagi sekadar menyampaikan pernyataan retorika tak berdasar kepada rakyat. ■

Mendengar dengan hati (Sumber: pdxchurch.org)





Orang-orang yang terhubung di Roblox (Sumber: corp.roblox.com)

# Masa Depan Kreasi Digital: APA YANG AKAN ANDA CIPTAKAN DI ROBLOX?

Remaja dengan laptop sederhana bisa menghasilkan puluhan ribu dolar dengan membuat gim di Roblox. Nike dan Gucci pun berinvestasi di platform ini, mengubahnya dari sekadar hiburan menjadi sumber penghidupan.

■ Penulis: Satria Yulanda

**B**agaimana pendapatmu tentang sebuah ide yang lahir dari garasi sederhana di San Mateo—saat Facebook baru diluncurkan dan YouTube belum ada, yang kini berputar sebagai “roda” ekonomi global bernilai miliaran dolar dan mengubah anak-anak menjadi pengembang (*developer*) profesional, bahkan menjadi ruang pemasaran bagi merek-merek kelas dunia, seperti Gucci dan Nike?

Inilah kisah tentang Roblox, platform gim yang kini menjadi alam metasemesta yang merevolusi cara orang bermain, belajar, bekerja, dan berkarya.

## Dari Garasi hingga Layar Jutaan Orang

Cerita Roblox berawal dari sebuah ruang kerja sederhana di San Mateo, California, Amerika Serikat pada 2004. David Baszucki dan Erik Cassel, sang pendiri, ingin membuat sebuah gim yang tidak biasa. Visi mereka adalah menciptakan sebuah platform yang memungkinkan semua orang menjadi pembuat gim. Gagasan revolusioner ini berakar dari pengalaman mereka dengan Interactive Physics, sebuah perangkat lunak simulasi fisika 2D yang diluncurkan pada 1989 untuk mengajarkan konsep fisika secara interaktif di sekolah-sekolah.

Pada 2005, versi beta diluncurkan dengan nama DynaBlocks. Nama ini kemudian berganti menjadi Roblox pada 2006, yang merupakan lakuran dari kata *robots* dan *blocks*. Platform ini berkembang secara perlahan tanpa sorotan media arus utama (*mainstream*). Meskipun demikian, Baszucki dan Cassel tidak goyah. Mereka terus mengembangkan Roblox Studio, sebuah alat gratis yang memungkinkan siapa pun, bahkan seorang anak berusia 10 tahun, untuk membuat gim menggunakan bahasa pemrograman Lua. Filosofi mereka sederhana: Jika Anda memberikan alat yang tepat kepada orang-orang, mereka akan menciptakan hal-hal yang bahkan tidak pernah Anda bayangkan.

**Dari Mainan Menjadi Ladang Investasi**  
Selama bertahun-tahun, Roblox identik dengan platform untuk anak-anak. Grafisnya yang berbentuk balok

dan penuh warna membuat banyak orang dewasa menganggapnya sekadar “gim anak-anak”. Namun, anak-anak yang bermain Roblox pada sekitar tahun 2010 kini telah dewasa, dan mereka ternyata tidak berhenti bermain. Data dari Roblox Corporation mengungkap tren yang mengejutkan: Lebih dari 40% pengguna aktifnya kini berusia di atas 17 tahun dan angka ini terus meningkat setiap kuartal.

Generasi yang telah dewasa ini kini memandang Roblox sebagai platform investasi, bukan sekadar hiburan. Para pengembang profesional dapat menghasilkan ratusan ribu hingga jutaan dolar Amerika Serikat (AS) per tahun dari gim yang mereka buat. Bahkan, sebagian dari mereka memutuskan berhenti dari pekerjaan tetap untuk fokus sepenuhnya pada Roblox, merekrut tim, dan menjalankan kampanye pemasaran layaknya studio gim profesional.

### Dari Robux hingga Miliaran Dolar

Aspek paling revolusioner dari Roblox terletak pada ekonominya. Platform ini memiliki mata uang internal bernama Robux yang dapat dibeli dengan uang tunai dan diuangkan kembali melalui program Developer Exchange (DevEx). Sistem ini terbukti sukses dengan data pada 2024 yang menunjukkan bahwa platform tersebut membayarkan lebih dari 740 juta dolar AS kepada para pengembang dan kreator di seluruh dunia—angka yang bahkan melebihi produk domestik bruto (PDB) beberapa negara kecil.

Di Indonesia, fenomena ini pun mulai tampak. Sejumlah pengembang lokal berhasil menciptakan gim yang populer secara global dengan pendapatan puluhan ribu dolar AS per bulan. Ekosistem pendukung turut berkembang, mencakup jasa pembuatan model 3D, *scripting*, desain suara, hingga pemasaran khusus untuk Roblox. Merek-merek ternama seperti Nike, Gucci, dan Chipotle bahkan telah meluncurkan pengalaman virtual di platform ini dengan anggaran ratusan ribu dolar. Roblox kini bukan “cuma” permainan anak-anak. Ia telah menjelma menjadi sebuah platform pemasaran serius yang memiliki dampak finansial dan didukung oleh komunitas pengguna yang aktif.

### Kontroversi dan Tantangan

Meskipun demikian, Roblox tidak melulu menyuguhkan kisah indah.

Platform ini juga menghadapi masalah serius, terutama terkait keamanan anak dan eksploitasi ekonomi. Moderasi konten menjadi tantangan terbesarnya. Dengan jutaan gim yang dibuat oleh pengguna, konten yang tidak pantas kerap lolos dari pengawasan. Bahkan, predator daring yang menyamar sebagai anak-anak turut menjadi ancaman nyata.

Sistem ekonominya juga memiliki sisi kelam. Roblox mengambil porsi 70% dari setiap transaksi dalam gim, hanya menyisakan 30% untuk pengembang. Ditambah dengan rasio konversi Robux ke dolar yang tidak menguntungkan, banyak kreator merasa dieksploitasi. Kritik juga muncul terhadap *loot box* yang terdapat dalam banyak gim populer—mekanisme yang pada dasarnya merupakan bentuk perjudian bagi anak-anak.

### Ketika Renjana Menjadi Identitas

Terlepas dari segala kontroversinya, satu hal tidak terbantahkan: Roblox telah menjadi bagian dari identitas digital generasi baru. Bagi jutaan pengguna di seluruh dunia, platform ini tidak hanya menjadi tempat bermain, tetapi juga menyediakan ruang untuk belajar, bersosialisasi, berekspresi, dan bahkan mencari penghasilan.

Banyak kisah inspiratif lahir dari platform Roblox, mulai dari anak-anak yang berhasil meraih beasiswa berkat keterampilan pengodean yang dipelajari di platform tersebut, hingga orang dewasa yang menemukan sumber penghidupan baru dengan menjadi pengembang di Roblox setelah

kehilangan pekerjaan selama pandemi.

Hal paling menarik dari Roblox adalah kemampuannya menciptakan lapangan bermain yang setara. Tidak peduli berasal dari keluarga kaya atau miskin, dari kota besar atau desa terpencil, selama memiliki koneksi internet dan kemauan belajar, setiap orang mempunyai peluang yang sama untuk meraih kesuksesan. Gim terbaik tidak selalu lahir dari pengembangan dengan peralatan termahal atau latar pendidikan tertinggi. Faktanya, sejumlah gim paling populer justru diciptakan oleh remaja di kamar kos mereka, hanya dengan menggunakan laptop lawas dan koneksi internet yang terbatas. Hal yang paling menentukan adalah kualitas ide, eksekusi, dan dedikasi.

Roblox terus berevolusi dengan menginvestasikan miliaran dolar untuk penelitian dan pengembangan, termasuk eksplorasi teknologi realitas virtual, penciptaan konten berbasis akal imitasi (AI), dan simulasi fisika yang lebih canggih. Mereka membayangkan masa depan ketika Roblox tidak lagi sekadar platform gim, melainkan wadah bagi beragam aktivitas seperti pendidikan, pekerjaan, hiburan, hingga interaksi sosial. Bagi jutaan pengguna di seluruh dunia, Roblox telah menjadi lebih dari sekadar gim; ia adalah renjana (*passion*), komunitas, dan gambaran masa depan.

Kini, pertanyaannya bukan lagi “Pernahkah Anda bermain Roblox?“, melainkan “Apa yang akan Anda ciptakan di Roblox?” ■





# PANDUAN PENGGUNAAN ALL INDONESIA

## DI [ALLINDONESIA.IMIGRASI.GO.ID](https://allindonesia.imigrasi.go.id)

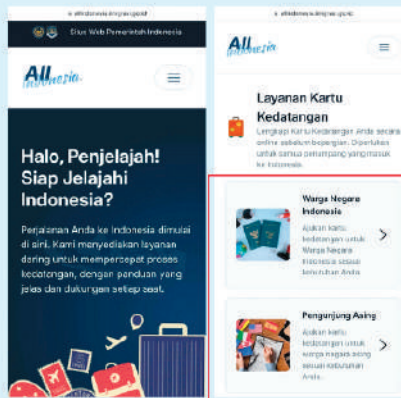
How to Use All Indonesia via [allindonesia.imigrasi.go.id](https://allindonesia.imigrasi.go.id)



[allindonesia.imigrasi.go.id](https://allindonesia.imigrasi.go.id)



**Pindai kode QR ini.** Penumpang dapat mengisi sejak **3 hari sebelum tiba di Indonesia.**  
**Scan this QR code.** All travellers are able to submit within **3 days before arrival.**

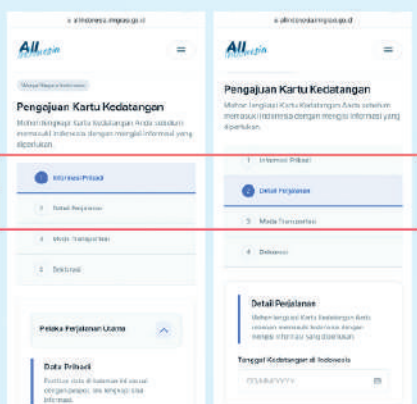


Kunjungi [allindonesia.imigrasi.go.id](https://allindonesia.imigrasi.go.id), pilih **Layanan Kartu Kedatangan**, dan pilih **status kewarganegaraan Anda: WNI atau Pengunjung Asing.**

Go to [allindonesia.imigrasi.go.id](https://allindonesia.imigrasi.go.id), select the **Arrival Card service**, and choose your **nationality status: Indonesian Citizen (WNI) or Foreign National (WNA).**

01

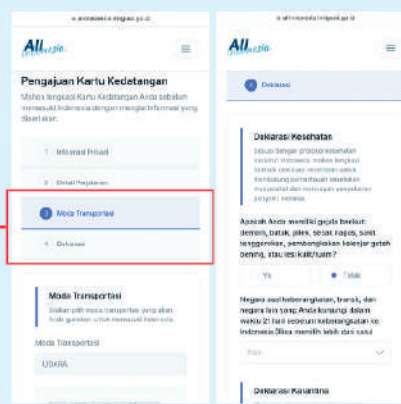
02



Isi **informasi pribadi** seperti nama lengkap, tanggal lahir, dan kewarganegaraan sesuai paspor. Lalu lengkapi **detail perjalanan** Anda, termasuk tanggal kedatangan, tujuan, dan nomor penerbangan.

Fill in your **personal information** such as full name, date of birth, and nationality as per your passport. Then, complete your **travel details** including arrival date, destination, and flight number.

03



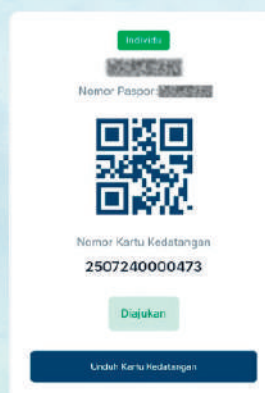
Pilih **mode transportasi** yang Anda gunakan, kemudian masukkan alamat tempat tinggal di Indonesia. Selanjutnya, isi **deklarasi** terkait informasi imigrasi, kesehatan, bea cukai, dan karantina.

Choose your **mode of transportation**, then provide your address in Indonesia. Next, fill in the **declaration** for immigration, health, customs, and quarantine information.

Periksa kembali informasi yang sudah Anda isi, pastikan semuanya benar, lalu klik **Kirim**.

Review the information you have entered, make sure it's accurate, then click **Submit**.

04



Setelah selesai, **Kartu Kedatangan** Anda akan ditampilkan dalam bentuk **kode QR**. Unduh dan simpan kode QR tersebut untuk proses kedatangan yang lebih cepat, aman, dan mudah.

Once completed, your **Arrival Card** will be shown as a **QR code**. Please download and save it for faster, safer, and easier arrival process.

# Capaian 1 Tahun Kabinet

DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI

Berdasarkan data per 17 Oktober 2025

**Golden visa** merupakan visa tinggal terbatas dengan memberikan masa tinggal di Indonesia untuk jangka waktu 5-10 tahun serta ditujukan bagi para investor atau talenta dunia untuk ikut membangun Indonesia menuju Indonesia Emas tahun 2045.

## Golden VISA Indonesia

Rp **48T** **Meningkat 132x**  
Nilai **Investasi** dibandingkan dengan tahun 2024



**386** Jumlah Pemegang  
**Meningkat 54,4%**  
dibandingkan tahun 2024



### Capaian PNBP

Rp **8.315.346.605.001**

**Meningkat 127%** dari target PNBP, yakni 6,55T

Perbandingan PNBP dari Tahun-Tahun Sebelumnya

#1	Tahun 2025	Rp8.315.346.605.001	<b>Meningkat 17,58%</b>
#2	Tahun 2024	Rp7.072.001.651.728	
#3	Tahun 2023*	Rp7.610.196.792.195	*Data dari Januari hingga Desember

Jumlah **Perlintasan**

**42.220.731** orang

**Meningkat 6,6%** dibandingkan tahun 2024



Jumlah **Pengguna Autogate**

**20.417.899** Pengguna

**Meningkat 148%** dibandingkan tahun 2024

**264** unit autogate yang tersebar pada 6 tempat pemeriksaan imigrasi di Indonesia



### Penegakan Hukum Keimigrasian TAK & Pro Justisia

**9.770** **Meningkat 117,69%**  
tindak administratif keimigrasian (TAK) **meningkat** dibandingkan tahun 2024

**73** **Menurun 30,5%**  
pro justisia **menurun** dibandingkan dengan tahun 2024

### All Indonesia

Platform sistem deklarasi kedatangan penumpang internasional terpadu berbasis aplikasi dan website yang berlaku di seluruh bandara dan pelabuhan internasional di Indonesia mulai tanggal 1 Oktober 2025



# IJFF 2025: Ribuan Diaspora Indonesia Ramaikan Festival Persahabatan Indonesia-Jepang

IJFF 2025 menjadi etalase budaya dan kuliner serta ajang pelayanan publik bagi diaspora. KBRI Tokyo menghadirkan layanan terpadu, seperti perpanjangan paspor dan konsultasi imigrasi langsung di lokasi.

Indonesia-Japan Friendship Festival (IJFF) pertama kali diselenggarakan pada 2008 untuk merayakan hubungan baik antara kedua negara. Kini, festival ini telah menjadi acara tahunan yang dinantikan. Puncaknya, IJFF 2025 kembali hadir di Taman Yoyogi, Tokyo, pada 18-19 Oktober 2025. Acara ini menjadi etalase megah bagi budaya dan kuliner Indonesia dan Jepang.

Acara yang gratis untuk umum ini menyajikan beragam pertunjukan budaya, kuliner khas, dan aktivitas seru yang mempertemukan dua budaya dalam suasana hangat penuh

persahabatan. Festival ini menjadi kesempatan berharga bagi warga Jepang untuk mengenal budaya Indonesia lebih dekat. Bagi warga Indonesia di Jepang, acara ini juga menjadi sarana untuk melepas rindu akan suasana tanah air sekaligus menikmati akhir pekan yang berwarna.

Di tengah riuhnya puluhan ribuan pengunjung, Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Tokyo memastikan bahwa festival ini juga berfungsi sebagai ajang pelayanan publik yang prima bagi diaspora Indonesia di Jepang.

"Perayaan 67 tahun persahabatan Indonesia-Jepang adalah cerminan

hubungan bilateral yang kokoh dan berorientasi ke masa depan. Kami berupaya untuk terus memfasilitasi layanan terbaik, baik bagi diaspora Indonesia di Jepang maupun warga negara Jepang yang membutuhkan informasi seputar keimigrasian Indonesia," jelas Atase Imigrasi KBRI Tokyo Arya Pradhana Anggakara.

Dalam festival tersebut, KBRI Tokyo menghadirkan layanan terpadu langsung di lokasi. Langkah ini menjawab kebutuhan ribuan warga negara Indonesia (WNI) yang tersebar di berbagai wilayah Jepang.

Stan khusus yang dioperasikan

Pertunjukan angklung di IJFF 2025 (Sumber: kemlu.go.id)





Layanan paspor di IJFF 2025 (Sumber: kemlu.go.id)

oleh Fungsi Konsuler dan Imigrasi KBRI Tokyo menjadi destinasi andalan para diaspora. Di sana, mereka dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk memperoleh informasi dan berkonsultasi mengenai dokumen perjalanan, perpanjangan paspor, serta isu keimigrasian vital lainnya. Selain itu, layanan kekonsuleran seperti lapor diri dan berbagai administrasi kependudukan juga tersedia.

Tidak hanya menyediakan layanan publik, KBRI Tokyo yang bekerja sama dengan Bank Indonesia (BI) Tokyo juga membuka stan promosi ekonomi. Stan tersebut menawarkan berbagai layanan, seperti konsultasi investasi dan pendidikan, serta sosialisasi penggunaan QRIS lintas negara.

Stan tersebut juga dimanfaatkan untuk mempromosikan pariwisata Indonesia, yang terlihat dari antusiasme pengunjung yang berfoto dengan replika komodo. Lebih dari seribu warga Jepang bahkan berpartisipasi dalam survei persepsi yang digelar di stan tersebut. Hal ini membuktikan peran aktif KBRI Tokyo dalam menjalankan diplomasi publik.

Festival yang diikuti 104 stan—didominasi kuliner khas Nusantara—ini makin meriah dengan kolaborasi seni unik, seperti Reog Sakura Manggala, serta penampilan musisi Raspati & Pia eks-Utopia dan Shakira Jasmine. Keberagaman penampilan ini sukses mengobati kerinduan diaspora Indonesia akan suasana tanah air.

“Seru banget, berasa kayak di Indonesia!” ujar Desi, seorang warga Indonesia yang tinggal di Shinjuku.

Kehadiran pimpinan MPR RI dan DPR RI serta sejumlah duta besar negara sahabat dalam acara pembukaan mengukuhkan posisi IJFF 2025 sebagai platform diplomasi yang dikelola dengan baik oleh KBRI Tokyo. ■

Sumber: Imigrasi KBRI Tokyo

## KDEI Taipei Kawal Penggantian Paspor Darurat PMI Korban Kecelakaan Kerja

KDEI Taipei melayani penggantian paspor, pendampingan, dan koordinasi dengan rumah sakit serta perusahaan untuk menjamin hak-hak PMI. Upaya ini menjadi bagian dari misi perlindungan WNI, khususnya pekerja migran yang rentan.

**K**antor Dagang dan Ekonomi Indonesia (KDEI) Taipei memberikan layanan penggantian paspor darurat kepada seorang pekerja migran Indonesia (PMI) di Taiwan yang mengalami kecelakaan kerja serius. PMI bernama AS (30) yang bekerja di Pabrik JY menderita luka bakar 85% di sekujur tubuhnya setelah terpapar cairan kimia pada September lalu. Kondisi tersebut mengharuskannya dirawat di Central Taiwan Burn Rehabilitation Center di Taichung.

Kepala Bidang Imigrasi KDEI Taipei Wahyu Wibisono melakukan kunjungan langsung ke pusat rehabilitasi di Taichung. “Kami memastikan proses penggantian paspor dilakukan secara cepat dan tepat demi mendukung kelancaran penanganan medis dan administrasi korban,” ujarnya.

Paspor AS perlu diganti karena masa berlakunya telah habis. Ia membutuhkan dokumen yang sah untuk melanjutkan masa tinggal di luar negeri guna penanganan medis dan penyelesaian administrasi.

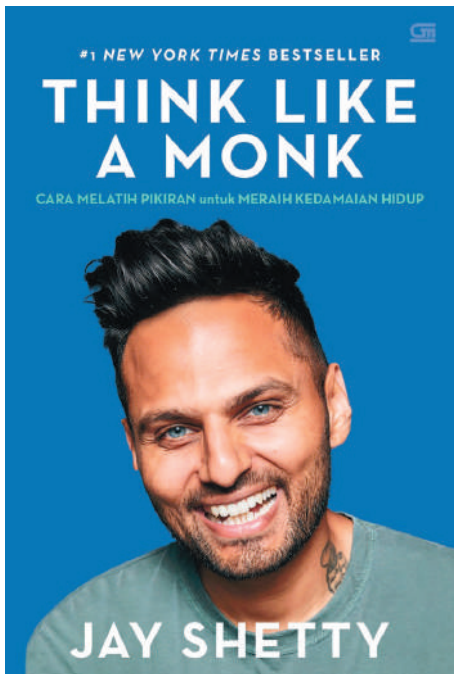
Di samping itu, petugas KDEI Taipei juga memberikan pendampingan serta berkoordinasi dengan rumah sakit, pusat rehabilitasi, dan PT JY untuk memastikan terpenuhinya hak-hak PMI tersebut. Langkah ini merupakan bagian dari misi KDEI Taipei untuk memperkuat perlindungan dan pelayanan bagi WNI di Taiwan, khususnya PMI yang rentan terhadap risiko kerja.

KDEI Taipei juga mengimbau seluruh PMI di Taiwan agar segera melapor apabila mengalami kondisi darurat. Dengan demikian, bantuan dan penanganan dapat diberikan secara cepat dan tepat. ■

Sumber: Bidang Imigrasi KDEI Taipei

KDEI Taiwan memberikan pendampingan dan layanan paspor darurat kepada AS, korban kecelakaan kerja di Taichung. (Foto: Dok. KDEI Taiwan)





Judul Buku : *Think Like A Monk*, Berpikir Seperti Rahib: Cara Melatih Pikiran untuk Meraih Kedamaian Hidup  
 Penulis : Jay Shetty  
 Penerbit : PT Gramedia Pustaka Utama  
 Tahun Terbit : November 2023 (cetakan kedua)  
 Halaman : 363 halaman

# THINK LIKE A MONK:

## Menjawab Kegelisahan Manusia Modern

*Think Like A Monk* memadukan kebijaksanaan monastik dengan solusi modern untuk mengelola pikiran. Buku ini menawarkan pendekatan konkret meraih ketenangan dan makna hidup di tengah tekanan dunia kerja.

■ Penulis: Fipit Fatimah

**T** *hink Like A Monk* adalah buku pengembangan diri karya Jay Shetty yang menggabungkan kebijaksanaan dari pengalaman hidupnya sebagai biksu di India dengan panduan praktis untuk kehidupan modern. Buku ini mengajak pembaca mengadopsi pola pikir biksu melalui melepaskan pikiran negatif, memperjelas nilai hidup, serta mengembangkan kebiasaan baik dan pengabdian kepada orang lain.

### (+) Kelebihan Buku

#### 1. Relevan dengan Kondisi Modern

Buku ini menjawab kegelisahan di era modern yang penuh dengan stres dan distraksi. Pembaca diajak menemukan arti hidup, ketenangan, serta kontrol pikiran untuk menjalani kehidupan dengan lebih sadar.

#### 2. Dilengkapi Latihan Praktis

Buku ini dilengkapi dengan saran konkret, latihan, pertanyaan refleksi, dan panduan meditasi. Berbagai latihan tersebut berguna untuk menerapkan ide-ide dari buku ini secara langsung.

#### 3. Nilai dan Makna yang Aplikatif

Buku ini menguraikan cara menemukan tujuan hidup melalui

pengabdian kepada orang lain. Bagi pegawai negeri sipil (PNS) yang tugas pokoknya melayani masyarakat, konsep ini sangat aplikatif.

#### 4. Memfasilitasi Perubahan Pola Pikir

Banyak pembahasan dalam buku ini berfokus pada pengelolaan pikiran serta cara mendeteksi dan mengendalikan emosi negatif. Hal ini dapat memfasilitasi perubahan pola pikir yang lebih positif di lingkungan kerja.

### (-) Kekurangan Buku

#### 1. Kedalaman Topik yang Terbatas

Buku ini menyebut banyak konsep yang memerlukan penjabaran lebih luas agar maksud penulis dapat ditangkap dengan jelas oleh pembaca. Namun, penjabaran yang lebih mendalam tentu akan menambah "berat" buku ini.

#### 2. Metafora "Biksu" yang Kurang Terjangkau

Kerangka berpikir "biksu" sebagai metafora bisa terasa jauh dan idealis bagi sebagian pembaca, khususnya dari kalangan PNS yang berhadapan

dengan sistem formal.

Mereka perlu usaha ekstra untuk menjembatani konteks kehidupan monastik dengan realitas rutinitas kerja di sektor publik.

#### 3. Keterbatasan Adaptasi Budaya Lokal

Buku ini ditulis berdasarkan latar belakang budaya Barat Inggris-India dan pengalaman monastik di India. Adaptasi langsung ke konteks Indonesia memerlukan penyesuaian lebih lanjut agar relevan secara budaya dan struktural.

Buku *Think Like A Monk* karya Jay Shetty menawarkan rangkaian pemikiran yang inspiratif dan praktis bagi siapa pun yang ingin menjalani hidup dengan lebih damai, bermakna, dan produktif. Bagi para PNS di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi, buku ini dapat menjadi alat bantu untuk memperkuat identitas sebagai pelayan publik, meningkatkan kualitas mental-emosional dalam pelaksanaan tugas, serta memusatkan tindakan pada nilai-nilai inti, tujuan, dan semangat pelayanan. ■



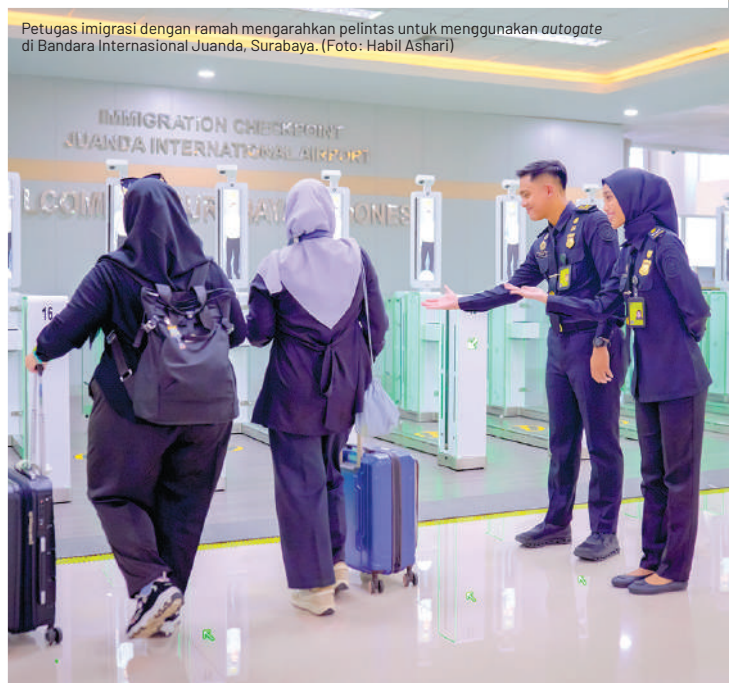
Kunjungan Menko Infrastruktur dan Menteri Imipas didampingi oleh Kepala Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta pada peluncuran All Indonesia (Foto: Alfiqri Anshari)



Pos Imigrasi Perbatasan Sota yang melayani para pelintas sebelum adanya PLBN Sota (Foto: Arif Rahman Suryaman)



Petugas imigrasi mengawasi para deteni di acara konferensi pers Ditjen Imigrasi. (Foto: Alfiqri Anshari)



Petugas imigrasi dengan ramah mengarahkan pelintas untuk menggunakan autogate di Bandara Internasional Juanda, Surabaya. (Foto: Habil Ashari)



PLBN Sota yang berada di wilayah kerja Kantor Imigrasi Merauke berbatasan langsung dengan Papua Nugini. (Foto: Arif Rahman Suryaman)



Suasana kegiatan donor darah di Direktorat Jenderal Imigrasi (Foto: Putu Maha Permana Aditya)



Pemeriksaan WNA pada Operasi Wira Waspada di wilayah kerja Kantor Imigrasi Bekasi (Foto: Dok. Kanim Bekasi)



Apel pengarahan Satgas Patroli Imigrasi Bali yang dipimpin langsung oleh Plt. Direktur Jenderal Imigrasi di Pelabuhan Tanjung Benoa (Foto: Dok. Kanim Ngurah Rai)

# ALL INDONESIA: Simplify Your Arrival



Fill out your Arrival Declaration online at [allindonesia.imigrasi.go.id](http://allindonesia.imigrasi.go.id) for a hassle-free arrival!

Oleh: @paperloova

# Make Memories, Not Paperwork

Skip the Queue. Enjoy Indonesia.

[evisa.imigrasi.go.id](https://evisa.imigrasi.go.id)



Location:  
Grojogan Watu Purbo  
Yogyakarta, Indonesia



Your Indonesian visa needs are now at your fingertips.  
Access the official portal at:  
[evisa.imigrasi.go.id](https://evisa.imigrasi.go.id)



**INDONESIAN  
IMMIGRATION**  
[www.imigrasi.go.id](https://www.imigrasi.go.id)



# Masuk Indonesia Kini Lebih Mudah dengan **All Indonesia**

# All Indonesia

Satu aplikasi untuk Imigrasi,  
Bea Cukai, Kesehatan,  
dan Karantina

Praktis, cepat, dan nyaman.  
Isi deklarasi sekali saja  
lewat *web* atau *mobile*.

[allindonesia.imigrasi.go.id](https://allindonesia.imigrasi.go.id)

